

**2025
SATKER**

LAPORAN KEUANGAN AUDITED

**BAWASLU
KALIMANTAN TIMUR**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Samarinda, 20 Februari 2025
Kepala Satuan Kerja, Sekretariat Bawaslu
Provinsi Kalimantan Timur



Nasori, S.H., M.H
NIP. 19710125 200502 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	11
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	47
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	70
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	89
F. Pengungkapan Lainnya	100

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
JL. MT. HARYONO NO. 128 SAMARINDA
TELEPON 0541-7779853, FAXIMILE 0541-7779855

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Samarinda, 20 Februari 2025
Kepala Satuan Kerja, Sekretariat Bawaslu
Provinsi Kalimantan Timur



Nasori, S.H., M.H
NIP. 19710125 200502 1 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp774.446.506,00. Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp69.841.495.615,00 atau mencapai 93,80 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp74.456.288.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp13.589.729.861,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp607.431.786,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp12.982.298.075,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp16.849.586,00 dan Rp13.572.880.275,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp449.508,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp70.870.145.112,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp70.869.695.604,00. Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp594.542.998,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp70.109.732.506,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp106.980.982.048,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp70.109.732.506,00 serta ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp52.541.358.178,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp13.572.880.275,00 dan mengalami penurunan sebanyak Rp93.048.101.773,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA. 2025		% thd Anggaran
		Anggaran	Realisasi	
A. Pendapatan Negara dan Hibah				
I. Pendapatan Perpajakan		0,00	0,00	0,00
1. Pajak Dalam Negeri		0,00	0,00	0,00
2. Pajak Perdagangan Internasional		0,00	0,00	0,00
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0,00	774.446.506,00	0,00
1. Pendapatan Sumber Daya Alam		0,00	0,00	0,00
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan		0,00	0,00	0,00
3. Pendapatan BLU		0,00	0,00	0,00
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		0,00	774.446.506,00	0,00
III. Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)		0,00	774.446.506,00	0,00
B. Belanja Negara	B.2			
I. Belanja Pemerintah Pusat		74.456.288.000,00	69.841.495.615,00	93,80
1. Belanja Pegawai	B.3	20.805.782.000,00	19.589.793.685,00	94,16
2. Belanja Barang	B.4	53.635.506.000,00	50.236.712.680,00	93,66
3. Belanja Modal	B.5	15.000.000,00	14.989.250,00	99,93
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang		0,00	0,00	0,00
5. Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00
6. Belanja Hibah		0,00	0,00	0,00
7. Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00
8. Belanja Lain-lain		0,00	0,00	0,00
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa				
1. Transfer ke Daerah		0,00	0,00	0,00
a. Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00
1. Dana Transfer Umum		0,00	0,00	0,00
a. Dana Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00
b. Dana Alokasi Umum		0,00	0,00	0,00
2. Dana Transfer Khusus		0,00	0,00	0,00
a. Dana Alokasi Khusus Fisik		0,00	0,00	0,00
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0,00	0,00	0,00
b. Dana Insentif Daerah		0,00	0,00	0,00

ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Dana Keistimewaan DIY		0,00	0,00	0,00
d. Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00
2. Dana Desa		0,00	0,00	0,00
3. Hibah kepada Daerah		0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Negara (B.1 + B.II)		74.456.288.000,00	69.841.495.615,00	93,80
C. Pembiayaan		0,00	0,00	0,00

Samarinda, 20 Februari 2025
Kepala Satuan Kerja, Sekretariat Bawaslu
Provinsi Kalimantan Timur



Nasori, S.H., M.H
NIP. 19710125 200502 1 002

II. NERACA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	0,00	100.157.989,00
Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)	C.3	195.000.000,00	980.661.473,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.4	404.369.509,00	406.869.509,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.5	(2.021.848,00)	(2.034.348,00)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	C.6	402.347.661,00	404.835.161,00
Persediaan	C.7	10.084.125,00	7.131.000,00
Jumlah Aset Lancar		607.431.786,00	101.550.616.724,00
Aset Tetap			
Tanah	C.8	6.880.971.617,00	562.424.000,00
Peralatan dan Mesin	C.9	12.004.801.450,00	14.443.167.801,00
Gedung dan Bangunan	C.10	2.216.476.000,00	895.705.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.11	30.500.000,00	30.500.000,00
Aset Tetap Lainnya	C.12	0,00	199.033.900,00
Akumulasi Penyusutan	C.13	(8.150.450.992,00)	(9.361.659.529,00)
Jumlah Aset Tetap		12.982.298.075,00	6.769.171.172,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.14	0,00	438.664.000,00
Aset Lain-Lain	C.15	353.614.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.16	(353.614.000,00)	(438.664.000,00)
Jumlah Aset Lainnya		0,00	14.680.000,00
Jumlah Aset		13.589.729.861,00	108.319.787.896,00
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.17	16.849.586,00	1.224.509.863,00

Uang Muka dari KPPN	C.18	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.19	0,00	114.295.985,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		16.849.586,00	1.338.805.848,00
Jumlah Kewajiban		16.849.586,00	1.338.805.848,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.20	13.572.880.275,00	106.980.982.048,00
Jumlah Ekuitas		13.572.880.275,00	106.980.982.048,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		13.589.729.861,00	108.319.787.896,00

Samarinda, 20 Februari 2025
Kepala Satuan Kerja, Sekretariat Bawaslu
Provinsi Kalimantan Timur



Nasori, S.H., M.H
NIP. 19710125 200502 1 002

III. LAPORAN OPERASIONAL
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	449.508,00	2.275.566,00
Jumlah Pendapatan		449.508,00	2.275.566,00
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	19.593.050.929,00	12.162.684.662,00
Beban Persediaan	D.3	18.318.075,00	1.296.230.650,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	22.767.631.134,00	118.369.632.232,00
Beban Pemeliharaan	D.5	701.178.975,00	1.906.456.273,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	26.399.697.255,00	141.855.883.629,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.390.281.244,00	1.314.640.792,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	(12.500,00)	0,00
Jumlah Beban		70.870.145.112,00	276.905.528.238,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(70.869.695.604,00)	(276.903.252.672,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset	D.9	165.420.100,00	(3.850.493,00)
Pendapatan Pelepasan Aset		364.454.000,00	5.000.000,00
Beban Pelepasan Aset		199.033.900,00	8.850.493,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	594.542.998,00	1.552.759.633,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		594.542.998,00	1.552.759.633,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	D.11	759.963.098,00	1.548.909.140,00

Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa		(70.109.732.506,00)	(275.354.242.532,00)
POS LUAR BIASA	D.12		
Beban Luar Biasa		0,00	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	D.13	(70.109.732.506,00)	(275.354.242.532,00)

Samarinda, 20 Februari 2025
Kepala Satuan Kerja, Sekretariat Bawaslu
Provinsi Kalimantan Timur



Nasori, S.H., M.H
NIP. 19710125 200502 1 002

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Ekuitas Awal	E.1	106.980.982.048,00	128.508.324.322,00
Surplus/Defisit LO	E.2	(70.109.732.506,00)	(275.354.343.532,00)
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.3	(75.839.727.445,00)	13.350.000,00
Penyesuaian Nilai Aset		0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		(1.774.800,00)	13.350.000,00
Koreksi Lain-Lain	E.3.1	(75.837.952.645,00)	0,00
Transaksi Antar Entitas	E.4	52.541.358.178,00	253.813.651.258,00
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E.5	(93.408.101.773,00)	(21.502.237.936,00)
Ekuitas Akhir	E.6	13.572.880.275,00	106.980.982.048,00

Samarinda, 20 Februari 2025
Kepala Satuan Kerja, Sekretariat Bawaslu
Provinsi Kalimantan Timur



Nasori, S.H., M.H
NIP. 19710125 200502 1 002

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum dan Profil Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

*Dasar
Hukum
dan Profil
Entitas*

1. Dasar Hukum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. dan pencalonan gubernur;
 3. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. dan calon gubernur;
 4. penetapan calon gubernur;
 5. pelaksanaan kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;

10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang. Pemilu lanjutan. dan Pemilu susulan; dan
11. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur;
 - b. mengelola. memelihara. dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
 - c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
 - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi. sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
 - h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

(2) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bawaslu Provinsi dapat:

- a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
- b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

2. Profil Sekretariat Bawaslu Provinsi

Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi dikepalai oleh Kepala Sekretariat yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi membawahi 3 (tiga) Kepala Bagian. yaitu :

- a) Kepala Bagian Administrasi;
- b) Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat;
- c) Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Per 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi

mulai dari pengumpulan data. pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap. persediaan. dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi. tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan Akuntansi

A.4. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Per 31 Desember 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

*Pendapatan
-LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan

dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar. Aset Tetap. Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset

a. Aset Lancar

Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.

Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir. apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas. diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah. jalan/irigasi/jaringan. dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus. ketinggalan jaman. tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang. rusak berat. tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR). atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya. dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan

Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan

amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software/Aplikasi Komputer	4
Lisensi	10

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga. Belanja yang Masih Harus Dibayar. Pendapatan Diterima di Muka. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka

panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan. *Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Per 31 Desember 2025 telah dilakukan 13 (tiga belas) kali revisi yaitu:

1. Revisi ke-01, dengan tanggal revisi 21 Februari 2025;
2. Revisi ke-02, dengan tanggal revisi 11 April 2025;
3. Revisi ke-03, dengan tanggal revisi 10 Juli 2025;
4. Revisi ke-04, dengan tanggal revisi 14 Juli 2025;
5. Revisi ke-05, dengan tanggal revisi 23 Juli 2025;
6. Revisi ke-06, dengan tanggal revisi 06 Agustus 2025;
7. Revisi ke-07, dengan tanggal revisi 19 September 2025;
8. Revisi ke-08, dengan tanggal revisi 03 Oktober 2025;
9. Revisi ke-09, dengan tanggal revisi 10 Oktober 2025;
10. Revisi ke-10, dengan tanggal revisi 03 November 2025;
11. Revisi ke-11, dengan tanggal revisi 14 November 2025;
12. Revisi ke-12, dengan tanggal revisi 26 November 2025;
13. Revisi ke-13, dengan tanggal revisi 11 Desember 2025.

Revisi anggaran ke-01 merupakan revisi DJA dikarenakan *automatic adjustment*/pencadangan anggaran untuk Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp16.403.100.000,00. Perubahan atas revisi tersebut dirincikan sebagai berikut:

Tabel 1. Perubahan atas Revisi Anggaran ke-01

Uraian	2025	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Belanja		
Belanja Pegawai	13.790.623.000,00	13.790.623.000,00
Belanja Barang	25.300.136.000,00	8.897.036.000,00
Jumlah Belanja	39.090.759.000,00	22.687.659.000,00

Revisi anggaran ke-02 merupakan revisi tingkat Kanwil DJPb Anggaran untuk melakukan penginputan dana hibah yaitu sebesar Rp70.641.014.000,00.

Revisi anggaran ke-03 merupakan revisi Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan revisi akun alih daya.

Tabel 2. Perubahan atas Revisi Anggaran ke-02

Uraian	2025	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Belanja Pegawai	13.790.623.000,00	15.789.649.000,00
Belanja Barang	79.538.050.000,00	83.476.432.000,00
Belanja Modal	0,00	0,00
Total Belanja	93.328.673.000,00	99.266.081.000,00

Revisi anggaran ke-04 merupakan revisi Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka revisi sisa sewa kendaraan.

Revisi anggaran ke-05 merupakan revisi tingkat kanwil dalam rangka perubahan pagu hibah.

Tabel 3. Perubahan atas Revisi Anggaran ke-05

Uraian	2025	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Belanja Pegawai	15.789.649.000,00	15.789.649.000,00
Belanja Barang	83.476.432.000,00	55.090.232.000,00
Belanja Modal	0,00	0,00
Total Belanja	99.266.081.000,00	70.879.881.000,00

Revisi anggaran ke-06 merupakan revisi tingkat Kanwil dalam rangka perubahan pagu hibah.

Tabel 4. Perubahan atas Revisi Anggaran ke-06

Uraian	2025	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Belanja Pegawai	15.789.649.000,00	15.789.649.000,00
Belanja Barang	55.090.232.000,00	53.216.553.000,00
Belanja Modal	0,00	0,00
Total Belanja	70.879.881.000,00	69.006.202.000,00

Revisi anggaran ke-07 merupakan revisi Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka revisi sisa sewa anggaran sewa gedung kantor Bawaslu Kabupaten/Kota.

Revisi anggaran ke-08 merupakan penambahan anggaran program nasional, jamuan tamu, sewa mobil dinas kabupaten/kota serta pakaian dinas. Selain itu, adanya pengurangan anggaran karena proses pecah DIPA satker baru yaitu Balikpapan dan Kutai Kartanegara. Perubahan anggaran tersebut dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5. Perubahan atas Revisi Anggaran ke-08

Uraian	2025	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Belanja Pegawai	15.789.649.000,00	15.662.239.000,00
Belanja Barang	53.216.553.000,00	53.515.977.000,00
Belanja Modal	0,00	0,00
Total Belanja	69.006.202.000,00	69.327.745.000,00

Revisi anggaran ke-09 merupakan perubahan anggaran tetap dengan pergeseran dalam satu KRO penguatan kelembagaan.

Revisi anggaran ke-10 terjadi dikarenakan adanya penambahan anggaran belanja pegawai, perubahannya dirincikan sebagai berikut:

Revisi anggaran ke-11 terjadi dikarenakan adanya pergeseran anggaran dalam satu KRO yang sama, dalam hal ini adalah penguatan kelembagaan.

Revisi anggaran ke-12 terjadi karena adanya perubahan anggaran tetap dengan pergeseran dalam satu KRO yang sama, dalam hal ini adalah penguatan kelembagaan dan pemeliharaan operasional.

Revisi anggaran ke-13 terjadi karena adanya perubahan anggaran tetap dengan pergeseran dalam satu KRO, dalam hal ini adalah anggaran belanja pegawai.

Realisasi

Pendapatan

Rp774.446.506,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp774.446.506,00. Pendapatan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi Kalimantan Timur merupakan pendapatan Negara Bukan Pajak yang berasal dari beberapa pendapatan dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		
	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	361.884.000,00	-
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0,00	449.508,00	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	10.006.600,00	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	398.929.598,00	-
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	606.800,00	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	0,00	2.570.000	-
Jumlah	0,00	1.423.479.636,00	-

Realisasi Pendapatan per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp774.446.506,00, merupakan PNPB Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang seluruhnya berasal dari Realisasi Pendapatan Bruto, yang diperoleh dari:

1. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp361.884.000,00 merupakan pendapatan dari hasil lelang kendaraan roda 4 Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Jumlah (Rp)
Setor Pendapatan Bukan Pajak Hasil Lelang Kendaraan Roda 4i	17/06/2025	2855155DFIP8M3OI	361.884.000,00
Total			361.884.000,00

2. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp449.508,00 merupakan pendapatan jasa giro Rekening Dana Pemilu dan Rekening Dana Hibah Bawaslu Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Jumlah (Rp)
Setor Jasa Giro Rekening Panwascom se-Kabupaten Penajam Paser Utara	13/02/2025	7EF101JNG83L6N97	205.370,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan Pilkada 2024 se-Kabupaten Kutai Kartanegara	27/03/2025	68A5148VVNU717M0	242.885,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan PSU se-Kabupaten Kutai Kartanegara	04/06/2025	F42F548VVO6DOUAT	1.253,00
Total			449.508,00

3. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Rp10.006.600,00 terdiri dari setor kelebihan pembayaran atas belanja pegawai tahun anggaran 2024 yang terdiri dari:

Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Jumlah (Rp)
Pengembalian Kelebihan Uang Makan PNS bulan Desember 2024	04/02/2025	ABAD96U8F7HMKIKM	6.634.050,00
Pengembalian Kelebihan Belanja Uang Makan PPPK bulan Desember 2024	04/02/2025	1C2E455DFICTQJDV	3.372.550,00
Total			10.006.600,00

4. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu Rp398.929.598,00 terdiri dari setor kelebihan pembayaran perjalanan dinas tahun anggaran 2024 yang terdiri dari:

Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Jumlah (Rp)
Pengembalian atas Uang Harian Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Black Campaign, Politik Uang, dan Politisasi SARA Pilkada serentak 2024 di Prov. Kaltim tgl 21 November 2024 an. M. Jordiansyah.dkk	01/10/2025	3B6540NA0E6L7E3C	900.000,00
Pengembalian Belanja Perlengkapan Peserta Apel Siaga Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara an. CV Karya Kutai Sekawan	10/10/2025	5562D6U8F89ORQB9	1.253.435,00
Pengembalian Biaya Pemeliharaan peralatan dan mesin kendaraan dinas operasional roda 4 Gakkumdu (BBM) Kota Balikpapan tahun 2024	11/10/2025	5159C6U8F89OSLFO	6.224.945,00
Pengembalian Perjalanan dinas Bawaslu Kota Balikpapan Tahun 2024 an. Wasanti S.H., M.H., dkk	11/10/2025	7B8A27QLV2S59K52	18.615.300,00
Pengembalian Belanja Jasa lainnya Media Sosialisasi Cetak Baliho Sosialisasi Outdoor Bawaslu kota Balikpapan thn 2024 an. PT Lima Raya Sinergi	12/10/2025	74C757QLV2S6AF0K	1.367.230,00
Pengembalian Belanja Jasa Lainnya Sarpras Pendukung Sosialisasi Bawaslu kota Balikpapan thn 2024 an. PT Lima Raya Sinergi	12/10/2025	550DA48VVOIKMF2I	1.135.289,00

Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Jumlah (Rp)
Pengembalian Belanja Sewa gedung dan Perlengkapan Rapat koordinasi antar Bawaslu Kota Balikpapan, panwas kecamatan dan pengawas TPS se kota Balikpapan thn 2024 an. PT Lima Raya Sinergi	12/10/2025	D242448VVOIKMG4E	3.686.724,00
Pengembalian Perjalanan Dinas Bawaslu Kukar TA 2024 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kukar	13/10/2025	58C042G503DSTL9U	21.605.200,00
Pengembalian belanja seminar kit Sosialisasi Pengawasan Menciptakan Pilkada Sehat tanpa Politik Uang, isu sara, hoax, dan ujaran kebencian tahun 2024 an. CV Nusa Etam Nusantara	13/10/2025	CB32855DFJ532J3F	7.871.171,00
Pengembalian Perjalanan Dinas Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 an. Abd. Khohar, dkk	13/10/2025	AD2C70NA0E945DSS	37.017.800,00
Pengembalian Belanja jasa Event Organizer Pengawasan Pilkada Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara an. CV. Topmost Management	25/10/2025	FAD1E3CIFU0EV5BQ	2.130.690,00
Pengembalian Belanja Bahan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara an. CV. Topmost Management	25/10/2025	161347QLV2SD056U	1.500.000,00

Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Jumlah (Rp)
Pengembalian Belanja Pengadaan Sewa Meubelair Panwas Kecamatan se-Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024 - Tahap 1	27/10/2025	7036961QVDNOLEAH	200.000.000,00
Pengembalian Belanja Pengadaan Jasa Paket Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 an. She's Cha Production	31/10/2025	5583E3CIFU0Q2CFT	2.000.000,00
Pengembalian belanja bahan peserta sosialisasi pengawasan pemilu Bawaslu Kota Balikpapan tahun 2024 a.n. CV. Kaizen Shin	01/11/2025	737BF0NA0E9KTIP5	3.000.000,00
Pengembalian belanja bahan perlengkapan rakor dengan stakeholder (apel siaga) Bawaslu Kota Balikpapan a.n. Kaizen Shin	01/11/2025	64BBD55DFJ5IUJN7	1.000.000,00
Pengembalian seminar kit pada kegiatan sosialisasi peningkatan pengawasan partisipatif bagi peran mahasiswa dalam pengawasan partisipatif pada Pilkada Serentak tahun 2024	21/11/2025	4087F48VVOLS7PE2	1.934.271,00
Pengembalian seminar kit pada kegiatan peran masyarakat partisipatif pada Pemilihan Serentak tahun 2024	21/11/2025	A6D3F55DFJ88KQ6H	2.109.184,00
Pengembalian seminar kit pada Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan di Provinsi Kalimantan Timur	21/11/2025	F47D53CIFU3FQP6N	3.906.816,00

Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Jumlah (Rp)
tahun 2024			
Pengembalian belanja pengadaan sewa sarana dan prasarana Sentra Gakkumdu a.n. CV Indah Karya Nusantara - Tahap 1	24/11/2025	B6B0E55DFJ88M9NJ	5.000.000,00
Pengembalian belanja alat tulis kantor, fotokopi/penggandaan dan komputer supply Bawaslu Kota Balikpapan tahun 2024 a.n. Toko Era	25/11/2025	72AEF61QVDQP8M8I	10.657.000,00
Pengembalian belanja operasional penambah daya tahan tubuh (vitamin) Bawaslu Kota Balikpapan tahun 2024 a.n. Apotek Madina Farma	25/11/2025	26AD561QVDQP8LOM	10.611.486,00
Pengembalian belanja pengadaan jasa paket kegiatan sosialisasi pengawasan pemilihan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 a.n. She's Cha Production - Tahap 2	28/11/2025	82A9D8N3ETHUNUSL	2.000.000,00
Pengadaan sewa Sarana dan Prasarana Kantor Gakkumdu 160.0/PL Bawaslu Kota Balikpapan tahun 2024	02/12/2025	873CB6U8F8D6UDHP	14.700.000,00
Pengembalian kelebihan pembayaran Honorarium Pokja Pemilihan Kepala Daerah Bawaslu Kota Balikpapan Tahun 2024 An. Kiki Dian Verawati Simanullang, S.H	09/12/2025	7B5956U8F8FLTUEB	3.420.000,00
Pengadaan paket pekerjaan operasional sewa sarana dan prasarana kantor Gakkumdu Bawaslu dan ruang sidang Bawaslu Kota Balikpapan tahun 2024	19/12/2025	48CCD61QVDTIHT5Q	24.698.057,00

Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Jumlah (Rp)
Pengembalian belanja pengadaan jasa paket kegiatan sosialisasi pengawasan pemilihan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 a.n. She's Cha Production - Tahap 3	30/12/2025	21D7155DFJBHUV9P	2.000.000,00
Total			398.929.598,00

Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 45,59% dibandingkan 31 Desember 2024. Penurunan ini terjadi dikarenakan menurunnya pendapatan jasa giro, penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu, dan penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu secara signifikan.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Uraian	Realisasi 31 Des 2025 (Rp)	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	361.884.000,00	5.000.000,00	7.137,68
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	449.508,00	2.275.566,00	(80,25)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	10.006.600,00	39.628.407,00	(74,75)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	398.929.598,00	1.376.575.663,00	(71,02)
Pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain	606.800,00	0,00	0
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN	2.570.000,00	0,00	0
Jumlah	774.446.506,00	1.423.479.636,00	(45,59)

Realisasi
Belanja
Negara
Rp277.782.78
7.265,00

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Instansi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp69.841.495.615,00 atau 93,80% dari anggaran belanja sebesar Rp74.456.288.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025		% Realisasi Anggaran
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Pegawai	20.805.782.000,00	19.589.793.685,00	94,16
Belanja Barang	53.635.506.000,00	50.236.712.680,00	93,66
Belanja Modal	15.000.000,00	14.989.250,00	99,93
Total Belanja Kotor	74.456.288.000,00	69.841.495.615,00	93,80
Jumlah	74.456.288.000,00	69.841.495.615,00	93,80

Dibandingkan dengan 31 Desember 2024, realisasi belanja per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 74,86% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2024 diselenggarakan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sehingga realisasi belanja sampai ke tingkat PTPS, sedangkan pada tahun 2025 tahapan Pemilu dan Pilkada telah selesai sehingga aktivitas belanja mengalami penurunan yang signifikan.

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi 31 Des 2025 (Rp)	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	19.589.793.685,00	12.162.684.662,00	61,06
Belanja Barang	50.236.712.680,00	261.416.812.603,00	(80,78)
Belanja Modal	14.989.250,00	4.203.290.000,00	(99,64)
Jumlah	69.841.495.615,00	277.782.787.265,00	(74,86)

*Realisasi**Belanja**Pegawai**Rp19.589.793.6**85,00***B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp19.589.793.685,00 dan Rp12.162.684.662,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 61,06% dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Kenaikan belanja pegawai disebabkan oleh adanya:

1. Penambahan jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2025;
2. Terdapat pegawai yang mengalami mutasi dari unit kerja lain ke Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

*Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Uraian	Realisasi 31 Des 2025 (Rp)	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.490.817.750,00	1.626.854.137,00	53,11
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	6.264.817.750,00	6.256.155.050,00	0,14
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	4.968.751.550,00	1.556.863.277,00	219,15
Belanja Lembur	62.177.000,00	28.734.000,00	116,39
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	5.804.006.760,00	2.694.078.198,00	115,44
Jumlah Belanja Kotor	19.589.793.685,00	12.162.684.662,00	61,06
Pengembalian Belanja Pegawai	(0,00)	(0,00)	-
Jumlah Belanja	19.589.793.685,00	12.162.684.662,00	61,06

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.162.684.662,00 seluruhnya berasal dari Anggaran Rupiah Murni (RM) yang dipergunakan untuk:

1. Pembayaran Gaji Pokok PNS dan PPPK bulan Januari s.d. Desember 2025;
2. Pembayaran THR dan Gaji 13 PNS dan PPPK Tahun 2025;
3. Pembayaran Uang Kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bulan Januari s.d. Desember 2025;
4. Pembayaran THR dan Gaji 13 Uang Kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2025;
5. Pembayaran Belanja Pembulatan Gaji PNS bulan Januari s.d Desember 2025;
6. Pembayaran Belanja Tunjangan Suami/Istri dan Tunjangan Anak PNS dan PPPK bulan Januari s.d. Desember 2025;
7. Pembayaran Belanja Tunjangan Umum PNS dan PPPK bulan Januari s.d. Desember 2025;
8. Pembayaran Tunjangan Struktural dan Fungsional PNS bulan Januari s.d. Desember 2025;
9. Pembayaran Tunjangan Fungsional PPPK bulan Januari s.d. Desember 2025;
10. Pembayaran Tunjangan PPh PNS bulan Januari s.d. Desember 2025;
11. Pembayaran Tunjangan Beras PNS dan PPPK bulan Januari s.d. Desember 2025;
12. Pembayaran Uang Makan PNS dan PPPK bulan Januari s.d. Desember 2025;
13. Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur PNS dan PPPK bulan Januari s.d. Desember 2025;
14. Pembayaran Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PNS dan PPPK bulan Januari s.d Desember 2025.

Realisasi

Belanja

Barang

Rp261.416.81

2.603,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp261.416.812.603,00 dan Rp117.347.977.038,00. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 118,62% dari Realisasi Belanja Barang per 31

Desember 2024. Kenaikan paling signifikan terjadi pada Belanja Perjalanan Dalam Negeri yaitu sebesar 199,51%. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2024 diselenggarakan Pemilu dan Pilkada sehingga realisasi belanja perjalanan dinas dalam negeri terjadi sampai ke tingkat PTPS, sedangkan pada tahun 2023 hanya terjadi tahapan Pemilu.

*Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	4.742.978.910,00	9.082.153.834,00	(47,78)
Belanja Barang Non Operasional	10.199.620.539,00	76.597.563.130,00	(86,68)
Belanja Barang Persediaan	21.271.200,00	16.685.050,00	27,49
Belanja Jasa	7.824.095.591,00	33.031.913.536,00	(76,31)
Belanja Pemeliharaan	703.353.975,00	1.906.456.273,00	(63,11)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	27.310.882.796,00	141.898.858.103,00	(80,75)
Jumlah Belanja Kotor	50.802.203.011,00	262.533.629.926,00	(80,65)
Pengembalian Belanja	(565.490.331,00)	(1.116.817.323,00)	49,37
Jumlah Belanja	50.236.712.680,00	261.416.812.603,00	(80,78)

Realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 sebesar Rp50.236.712.680,00 dipergunakan untuk:

1. Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif;
3. Pengawasan Pilkada Serentak Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
6. Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc;
7. Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu;

8. Honorarium dan Operasional Pengawas Ad-Hoc;
9. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye;
10. Pengawasan Masa Kampanye dan Masa Tenang;
11. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Tenang;
12. Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara;
13. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
14. Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu;
15. Publikasi Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
16. Pengawasan Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
17. Penanganan Pelanggaran Logistik;
18. Pengawasan Logistik;
19. Layanan Reformasi Kinerja;
20. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu;
21. Layanan Data dan Informasi;
22. Layanan BMN;
23. Layanan Perkantoran;
24. Layanan Sarana Internal;
25. Layanan Perencanaan dan Penganggaran;
26. Layanan Pemantauan dan Evaluasi;
27. Layanan Manajemen Keuangan;
28. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan;
29. Layanan Hukum, Layanan Umum, dan Layanan Bantuan Hukum; dan
30. Layanan Manajemen SDM.

Realisasi belanja barang dari bulan Januari s.d. Desember 2025 bersumber dari Anggaran Rupiah Murni (RM) dan Hibah Langsung Dalam Negeri (HLD).

Rincian sumber dana per jenis belanja barang dari bulan Januari s.d. Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Realisasi Anggaran RM (Rp)	Realisasi Anggaran HLD (Rp)
Belanja Keperluan Perkantoran	4.015.401.909,00	141.584.901,00
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	207.613.500,00	110.940.000,00
Belanja Barang Operasional Lainnya	267.438.600,00	0,00
Belanja Bahan	171.150.950,00	2.450.757.429,00
Belanja Honor Output Kegiatan	0,00	7.235.630.000,00
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	23.300.000,00	313.296.927,00
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	21.271.200,00	0,00
Belanja Langganan Listrik	310.626.741,00	61.127.353,00
Belanja Langganan Air	39.784.266,00	19.532.235,00
Belanja Sewa	3.616.299.996,00	3.286.960.106,00
Belanja Jasa Profesi	130.600.000,00	101.700.000,00
Belanja Jasa Lainnya	160.000.000,00	91.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19.890.000,00	5.249.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	610.669.343,00	65.370.632,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.216.013.885,00	15.342.803.485,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	96.445.000,00	5.265.229.860,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	702.537.637,00	2.681.600.105,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	300.533.117,00	634.505.307,00
Jumlah Belanja Kotor	12.909.576.144,00	37.892.626.867,00
Pengembalian Belanja	(480.150.804,00)	(85.339.527,00)
Jumlah Belanja	12.429.425.340,00	37.807.287.340,00

*Realisasi
Belanja Modal
Rp14.989.250,
00*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp14.989.250,00 dan Rp4.203.290.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 mengalami penurunan drastis sebesar 99,64% dibandingkan dengan 31 Desember 2024. namun persentase realisasi terhadap anggarannya meningkat dari 92,23% di 2024 menjadi 99,93% di 2025. Hal tersebut dikarenakan menurunnya juga anggaran belanja modal dari 2024 ke 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.989.250,00	4.203.290.000,00	(99,64)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	14.989.250,00	4.203.290.000,00	(99,64)
Pengembalian	(0,00)	(0,00)	0,00
Jumlah Belanja	14.989.250,00	4.203.290.000,00	(99,64)

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.203.290.000,00 dan Rp15.000.000,00. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 99,64% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi ini digunakan untuk pengembangan sistem informasi Bawaslu berupa pembelian CCTV.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31
Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Uraian	Realisasi 31 Des 2025 (Rp)	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.989.250,00	4.203.290.000,00	(99,64)
Jumlah Belanja	14.989.250,00	4.203.290.000,00	(99,64)

Pembelian Peralatan dan Mesin dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel Mutasi Pembelian Peralatan dan Mesin TA 2025

Kode Barang	Jenis BMN	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
3.05,01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	1	14.989.250,00
Total		1	14.989.250,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp0,00*

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Kas lainnya dan setara kas dapat dirincikan sebagai berikut:

Keterangan	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

*Belanja Dibayar
di Muka (Prepaid)
Rp195.000.000,00*

C.3 Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)

Saldo Belanja Dibayar di Muka (Prepaid) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp195.000.000,00 dan Rp980.661.473,00. Belanja Dibayar di Muka (Prepaid) sebesar Rp195.000.000,00 merupakan Sewa Gedung Kantor Bawaslu Kota Balikpapan untuk 12 (dua belas) bulan terhitung dari 11 Juli 2025 s.d. 15 Juli 2026 sebesar Rp390.000.000,00 dan Beban Sewa Gedung Bawaslu Kota Balikpapan untuk 6 (enam) bulan terhitung dari 11 Juli 2025 s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp195.000.000,00.

Rincian Belanja Dibayar di Muka (Prepaid) sebesar Rp195.000.000,00 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jangka Waktu Sewa (Bulan)	Periode		Jumlah Nilai Sewa	Beban Sewa per 31 Des 2025	Sewa Dibayar di Muka per 31 Des 2025
		Mulai	Berakhir			
Sewa gedung kantor Bawaslu Kota Balikpapan	12	11 Juli 2025	15 Juli 2026	390.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00

Bagian Lancar

TP/TGR

Rp404.369.509,0

0

C.4 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Bagian lancar tagihan tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp404.369.509,00 dan Rp406.869.509,00. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut merupakan temuan sisa dana hibah Pilkada serentak tahun 2015 yang belum dikembalikan ke kas daerah oleh Panwaslu Kota Samarinda per 31 Desember 2025 senilai Rp404.369.509,00. Selisih senilai Rp2.500.000,00 merupakan penyetoran kas dari tuntutan ganti rugi tersebut ke kas negara menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda melalui Bank Kaltim pada tanggal 11 Juni 2025.

Penyisihan

Piutang - Bagian

Lancar TP/TGR

Rp2.021.848,00

C.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian lancar tagihan tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.021.848,00.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dihitung berdasarkan PMK Nomor

201/PMK.06/2010, yaitu ditetapkan paling sedikit 5‰ (lima permil) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian lancar tagihan tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.021.848,00. Nilai tersebut merupakan 5‰ (lima permil) dari nilai Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yaitu Rp404.369.509,00.

*Bagian Lancar
TP/TGR (Netto)
Rp402.347.661,0
0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)

Nilai tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp402.347.661,00. Piutang Tagihan Perbendaharaan adalah Piutang yang timbul dari akibat tuntutan yang dikenakan Bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara. Tagihan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundangan. Nilai tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) sebesar Rp402.347.661,00 merupakan hasil dari nilai tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp404.369.509,00 dikurangi nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp2.021.848,00.

*Persediaan
Rp10.084.125,00*

C.7 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp10.084.125,00 dan Rp7.131.000,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Jenis	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
Barang Konsumsi	10.084.125,00	7.131.000,00
Persediaan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	10.084.125,00	7.131.000,00

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik, yang terdiri dari:

No	Kode Barang	Jenis Barang	Nominal (Rp)
1	1010301001	Alat tulis	633.475,00
2	1010301002	Tinta tulis, tinta stempel	452.550,00
3	1010301003	Penjepit kertas	592.300,00
4	1010301004	Penghapus/korektor	45.500,00
5	1010301005	Buku tulis	79.450,00
6	1010301006	Ordner dan map	124.500,00
7	1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	37.050,00
8	1010301010	Alat perekat	189.925,00
9	1010301012	Staples	55.125,00
10	1010301999	Alat tulis kantor lainnya	94.125,00
11	1010302001	Kertas HVS	170.550,00
12	1010302002	Berbagai kertas	400.800,00
13	1010302004	Amplop	32.800,00
14	1010304004	Tinta/toner printer	3.004.125,00
15	1010306002	Lampu listrik	2.718.400,00
16	1010306010	Batu baterai	893.450,00
17	1010309001	Meterai	560.000,00
Total			10.084.125,00

Mutasi nilai Persediaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	7.131.000,00
Mutasi Tambah	
Pembelian – Barang Konsumsi	21.271.200,00
Jumlah Mutasi Tambah	28.402.200,00
Mutasi Kurang	

Pemakaian – Barang Konsumsi	(18.318.075,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(18.318.075,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	10.084.125,00

Penjelasan Mutasi:

1. Pembelian sebesar Rp21.271.200,00 merupakan pembelian persediaan yang terdiri dari:

No	Kode	Nama Barang	Kuantitas	Jumlah (Rp)
1	1010301010	Alat Perekat	14	229.325,00
2	1010301001	Alat Tulis	61	840.100,00
3	1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	15	201.225,00
4	1010399999	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	250	5.750.000,00
5	1010302004	Amplop	3	49.200,00
6	1010302002	Berbagai Kertas	21	501.600,00
7	1010301005	Buku Tulis	9	118.450,00
8	1010301008	Cutter	8	37.050,00
9	1010302001	Kertas HVS	10	568.500,00
10	1010306002	Lampu LED	13	2.718.400,00
11	1010309001	Meterai	86	890.000,00
12	1010301006	Ordner dan Map	136	865.950,00
13	1010301004	Penghapus/Korektor	10	80.300,00
14	1010301003	Penjepit Kertas	101	592.300,00
15	1010301012	Staples	5	55.125,00
16	1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	11	711.150,00
17	1010304004	Tinta/Toner Printer	45	6.987.175,00
18	1010304006	USD/Flash Disk	1	75.350,00
Total			799	21.271.200,00

2. Mutasi kurang berupa pemakaian persediaan sampai dengan periode 31 Desember 2025 sebesar (Rp18.318.075,00) terdiri dari:

No	Kode	Nama Barang	Kuantitas	Jumlah (Rp)
1	1010301010	Alat Perekat	2	(39.400,00)
2	1010301001	Alat Tulis	17	(206.625,00)
3	1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	7	(107.100,00)
4	1010399999	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	300	(7.062.500,00)
5	1010302004	Amplop	1	(16.400,00)
6	1010306010	Batu Baterai	184	(2.943.550,00)
7	1010302002	Berbagai Kertas	5	(100.800,00)
8	1010301005	Buku Tulis	2	(39.000,00)
9	1010302001	Kertas HVS	7	(397.950,00)
10	1010304010	Mouse	5	(881.500,00)
11	1010309001	Meterai	140	(1.430.000,00)
12	1010301006	Ordner dan Map	76	(741.450,00)
13	1010301004	Penghapus/Korektor	6	(34.800,00)
14	1010301002	Tinta Tulis. Tinta Stempel	4	(258.600,00)
15	1010304004	Tinta/Toner Printer	16	(3.983.050,00)
16	1010304006	USB/Flash Disk	1	(75.350,00)
Total			773	(18.318.075,00)

C.8 Tanah

Tanah
Rp6.880.971.617, 00

Saldo aset tetap berupa Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp6.880.971.617,00 dan Rp562.424.000,00. Rincian saldo aset tetap Tanah sebesar Rp6.880.971.617,00 adalah sebagai berikut:

1. Hibah masuk berupa tanah dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk Bawaslu Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp6.374.597.000,00 sesuai dengan NPHD Nomor 000.2.4/067/KJS-TU.P/II/2025 dan 104/PL.03.02/KI/02/2025 tanggal 24 Februari 2025; dan
2. Hibah masuk berupa tanah dari Pemerintah Kabupaten Kutai

Kartanegara untuk Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp506.374.617,46 sesuai dengan NPHD Nomor: R-000.2.3.2/145/Aset-BKAD dan 386/PL.03.02/KI/09/2025 tanggal 06 Oktober 2025.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	562.424.000,00
Mutasi Tambah	
Hibah Masuk	6.880.971.617,00
Transfer Masuk	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	7.443.395.617,00
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	(562.424.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(562.424.000,00)
Saldo Per 31 Desember 2025	6.880.971.617,00

Peralatan dan

Mesin

Rp12.004.801.45

0,00

C.9 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp12.004.801.450,00 dan Rp14.443.167.801,00.

Rincian peralatan dan mesin yang ada, adalah sebagai berikut:

Kode Barang	Jenis BMN	Jumlah	Nominal (Rp)
3.05.02.06.007	Loud Speaker	1	8.600.000,00
3.10.01.02.003	Note Book	2	68.154.000,00
3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	9	128.395.041,00
3.05.02.04.006	Kipas Angin	2	3.397.500,00
3.01.03.04.001	Transportable Generating Set	7	197.366.000,00
3.05.01.05.017	Mesin Absensi	1	11.700.000,00
3.05.02.06.080	Bracket Standing Peralatan	1	1.000.000,00
3.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	1	3.795.000,00
3.05.02.04.001	Lemari Es	5	10.001.000,00

3.06.02.07.005	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	6	29.787.500,00
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	91	245.667.807,00
3.06.01.02.128	Camera Digital	23	263.915.000,00
3.05.02.06.087	Neon Box	1	2.750.000,00
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	29	326.251.050,00
3.05.02.01.006	Bangku Panjang Besi/Metal	6	3.000.000,00
3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	13	22.664.500,00
3.07.01.01.171	Thermometer Gun	9	25.650.000,00
3.05.01.05.081	Papan Pengumuman	1	5.500.000,00
3.10.01.02.001	P.C Unit	116	1.040.053.197,00
3.10.01.02.002	Lap Top	82	921.850.169,00
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	71	224.984.8757,00
3.05.02.01.005	Sice	21	114.859.086,00
3.10.02.04.006	Repeater and Transciever	1	2.500.000,00
3.05.02.05.015	Rak Piring Alumunium	1	2.500.000,00
3.02.01.01.003	Station Wagon	7	4.018.700.000,00
3.05.01.05.010	White Board	6	7.650.000,00
3.05.02.06.002	Televisi	10	102.180.400,00
3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	9	35.870.000,00
3.05.02.01.008	Meja Rapat	29	170.949.987,00
3.05.02.06.016	Mic Conference	8	77.545.000,00
3.05.02.06.046	Handy Cam	2	18.971.107,00
3.06.01.02.165	Camera Conference	4	68.517.000,00
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	3	49.384.500,00
3.10.02.04.015	Firewall	1	34.500.000,00
3.02.01.02.003	Mini Bus	4	1.593.200.000,00

	(Penumpang 14 Orang)		
3.05.01.04.004	Rak Kayu	3	5.900.000,00
3.05.02.04.004	A.C. Split	115	416.568.321,00
3.05.02.06.077	Bendera Negara	3	1.485.000,00
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	383	488.475.952,00
3.10.01.02.009	Tablet PC	8	54.244.000,00
3.05.02.06.030	Tiang Bendera	10	4.950.000,00
3.06.02.01.999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	9	29.052.000,00
3.10.02.04.003	Hub	1	1.485.000,00
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	26	50.830.570,00
3.06.01.01.088	Voice Recorder	19	19.981.216,00
3.05.01.04.007	Brandkas	8	38.425.418,00
3.05.02.01.004	Kursi Kayu	8	33.123.000,00
3.05.02.06.008	Sound System	13	118.977.617,00
3.10.02.04.002	Router	1	6.000.000,00
3.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	3.500.000,00
3.10.02.04.026	Acces Point	4	4.920.000,00
3.07.01.01.127	Kursi Dorong	2	2.780.563,00
3.06.01.02.118	Head Set	2	8.795.000,00
3.05.01.04.003	Rak Besi	46	81.705.250,00
3.06.01.02.043	Stabilizing Amplifier	1	7.976.428,00
3.05.02.04.005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2	14.749.000,00
3.05.01.05.052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	1	5.000.000,00
3.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	85	165.907.000,00
3.05.01.05.001	Tabung Pemadam Api	4	8.750.000,00
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	185	323.490.895,00
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	17	180.956.550,00

3.06.03.47.002	Genset	1	13.000.000
3.06.01.02.061	Lensa Kamera	1	10.140.000,00
3.06.01.01.036	Microphone/Wireless MIC	1	5.800.000,00
3.19.01.02.001	Alat Tenis Meja	1	8.000.000,00
3.19.01.03.010	Treadmill	2	70.000.000,00
3.19.01.06.003	Sepeda Olah Raga	2	35.500.000,00
3.06.01.02.170	Gimbal Tripod	1	4.900.000,00
3.19.01.06.006	Samsak Tinju	1	4.500.000,00
3.19.01.06.999	Peralatan Olah Raga Lainnya	2	28.500.000,00
Total		1.541	12.004.801.450,00

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	14.443.167.801,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	14.989.250,00
Hibah Masuk	224.890.000,00
Perolehan Lainnya	185.000.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	14.868.047.051,00
Mutasi Kurang	
Penghentian Aset dari Penggunaan	(1.148.800.000,00)
Transfer Keluar	(1.712.473.601,00)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(1.972.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(2.863.245.601,00)
Saldo per 31 Desember 2025	12.004.801.450,0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(8.026.090.453,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	3.978.710.997,00

Pembelian Peralatan dan Mesin dapat dirincikan sebagai berikut:

Pembelian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

Kode Barang	Jenis BMN	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
3.05,01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	1	14.989.250,00
Total		1	14.989.250,00

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa hibah masuk merupakan hibah barang dari Pemerintah Kota Bontang kepada Bawaslu Kota Bontang dengan rincian sebagai berikut:

Hibah Masuk Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

Kode Barang	Jenis BMN	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
3050201002	Meja Kerja Kayu	5	16.000.000,00
3050201003	Kursi Besi/Metal	5	15.000.000,00
3050201005	Sice	1	22.450.000,00
3050201008	Meja Rapat	1	30.100.000,00
3050206007	Loudspeaker	1	8.600.000,00
3060101036	Microphone/Wireless MIC	1	5.800.000,00
3060102061	Lensa Kamera	1	10.140.000,00
3060102128	Camera Digital	1	18.900.000,00
3060102165	Camera Conference	1	26.500.000,00
3060102170	Gimbal Tripod	1	4.900.000,00
3100102001	P.C Unit	1	66.500.000,00
Total		19	224.890.000,00

Mutasi transaksi perolehan lainnya peralatan dan mesin merupakan barang yang diperoleh oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sebagai reward dari bank atas penempatan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah pada rekening bank tersebut. Rincian Perolehan Lainnya sebesar Rp185.000.000,00 adalah sebagai berikut:

Perolehan Lainnya Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

Kode Barang	Jenis BMN	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
3050104003	Rak Besi	1	1.000.000,00
3050201005	Sice	1	8.000.000,00

3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	3.500.000,00
3050205015	Rak Piring Alumunium	1	2.500.000,00
3100102009	Tablet PC	3	15.000.000,00
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	8.500.000,00
3190102001	Alat Tennis Meja	1	8.000.000,00
3190103010	Treadmill	2	70.000.000,00
3190106003	Sepeda Olah Raga	2	35.500.000,00
3190106006	Samsak Tinju	1	4.500.000,00
3190106999	Peralatan Olah Raga Lainnya	2	28.500.000,00
Total		18	185.000.000,00

Mutasi transaksi pengurangan peralatan dan mesin penghentian aset dari penggunaan terdiri atas:

*Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2025*

Kode Barang	Jenis BMN	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	4	(1.148.800.000,00)
Total		4	(1.148.800.000,00)

Mutasi koreksi pencatatan nilai berkurang dari peralatan dan mesin terdiri atas:

Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang per 31 Desember 2025

Kode Barang	Jenis BMN	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
3.06.01.02.118	Head Set	2	(1.972.000,00)
Total		2	(1.972.000,00)

Mutasi atas transfer keluar peralatan dan mesin berasal dari transfer keluar peralatan dan mesin ke Bawaslu Kota Balikpapan dan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan dasar dokumen berupa Berita Acara Transfer Barang Milik Negara Nomor: 446/PL.09/KI/10/2025 dan Berita Acara Transfer Barang Milik Negara Nomor: 453/PL.09/KI/10/2025.

Transfer Keluar Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

No	Kode	Nama Barang	Kuantitas	Jumlah (Rp)
1.	3010304001	Transportasi Generating Set	2	18.932.000,00
2.	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke Bawah)	2	619.800.000,00
3.	3050104001	Lemari Besi/Metal	10	23.572.800,00
4.	3040104003	Rak Besi	6	5.700.000,00
5.	3050104005	Filing Cabinet Besi	6	13.900.000,00
6.	3050104007	Brandkas	2	7.700.000,00
7.	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	2	29.847.800,00
8.	3050105015	Alat Penghancur Kertas	1	4.000.000,00
9.	3050105048	LCD Projector/Infocus	5	53.911.375,00
10.	3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	4	6.157.000,00
11.	3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	14	30.600.000,00
12.	3050201002	Meja Kerja Kayu	48	83.800.000,00
13.	3050201003	Kursi Besi/Metal	67	78.900.000,00
14.	3050201004	Kursi Kayu	5	17.500.000,00
15.	3050201008	Meja Rapat	4	8.000.000,00
16.	3050204004	A.C. Split	28	90.460.000,00
17.	3050206002	Televisi	2	19.898.000,00
18.	3050206008	Sound System	2	19.694.500,00

19.	3050206016	Mic Conference	2	19.650.000,00
20.	3060102128	Camera Digital	4	48.348.493,00
21.	3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	1	3.444.000,00
22.	3060207005	Finger Printer Time and Attendance Access Control System	2	8.700.000,00
23.	3100102001	P.C. Unit	31	239.128.598,00
24.	3100102002	Laptop	16	149.826.985,00
25.	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	21	48.666.000,00
26.	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6	62.336.050,00
Total			293	1.712.473.601,00

*Gedung dan
Bangunan
Rp2.216.476.000,
00*

C.10 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.216.476.000,00 dan Rp895.705.000,00. Gedung dan Bangunan senilai Rp2.216.476.000,00 merupakan terdiri dari:

1. Transfer masuk dari Bawaslu Republik Indonesia atas hibah bangunan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp895.705.000,00 sesuai dengan Berita Acara Transfer Barang Milik Negara dari Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 50/PL.09/KB/08/2024 tanggal 24 Agustus 2024; dan
2. Penerimaan Aset Tetap Renovasi Bangunan Gedung Kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp1.320.771.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: P.199/DPU/CK/600.1.15.2/2/2025 dan Nomor: 068/PL.03.02/KI/02/2025 tanggal 07 Februari 2025.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	895.705.000,00
Mutasi Tambah	
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	1.320.771.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	2.216.476.000,00
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	(0,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(0,00)
Saldo per 31 Desember 2025	2.216.476.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(109.891.789,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	2.106.584.211,00

*Jalan, Jaringan,
dan Irigasi
Rp30.500.000,00*

C.11 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp30.500.000,00 dan Rp30.500.000,00. Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dirincikan sebagai berikut:

Uraian	Nominal (Rp)
Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Sedang	30.500.000,00
Total	30.500.000,00

Instalasi Lain-Lain merupakan Aset berupa instalasi jaringan internet yang perolehannya berasal dari transfer masuk dari pusat.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	30.500.000,00
Mutasi Tambah	
Penambahan Jaringan Teknologi Informasi	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	30.500.000,00
Mutasi Kurang	(0,00)
Saldo per 31 Desember 2025	30.500.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(14.468.750,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	16.031.250,00

*Aset Tetap
Lainnya
Rp0,00*

C.12 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp199.033.900,00. Aset tetap lainnya ini merupakan renovasi atas gedung kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebagaimana rincian berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	199.033.900,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
Mutasi Kurang	
Penghentian Aset dari Penggunaan	(199.033.900,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(199.033.900,00)
Saldo per 31 Desember 2025	0,00

*Akumulasi
Penyusutan
Rp8.150.450.992,
00*

C.13 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp8.150.450.992,00 dan Rp9.361.659.529,00. Nilai Akumulasi Penyusutan tersebut terdiri atas:

Keterangan	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	8.026.090.453,00	9.269.529.905,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	109.891.789,00	76.854.999,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	14.468.750,00	13.906.250,0
Total	8.150.450.992,00	9.361.659.529,00

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025:

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akm Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	14.429.817.801,00	(8.026.090.453,00)	5.160.287.896,00
2	Gedung dan Bangunan	2.216.476.000,00	(109.891.789,00)	2.106.584.211,00
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	30.500.000	(14.468.750,00)	16.031.250,00
Total		16.676.793.801,00	(8.150.450.992,00)	5.995.731.647,00

C.14 Aset Tak Berwujud

*Aset Tak
Berwujud
Rp0,00*

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2021 adalah Rp0,00 dan Rp438.664.000,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	438.664.000,00
Mutasi Tambah	
Pengembangan Nilai Aset	0,00
Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	438.664.000,00
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	(85.050.000,00)
Barang yang Dihentikan Penggunaannya	(353.614.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(85.050.000,00)
Saldo per 31 Desember 2025	0,00
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	(0,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	0,00

Mutasi Keluar berupa transfer keluar sebesar Rp85.050.000,00 merupakan transfer aset tak berwujud berupa *software* komputer dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur ke Bawaslu Kota Balikpapan dan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai satuan kerja baru, dengan rincian sebagai berikut:

Kode Barang	Jenis BMN	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)
8.01.01.01.001	Software Komputer	2	85.050.000,00
Total		2	85.050.000,00

Adapun daftar barang milik negara yang dihentikan penggunaannya pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Kode Barang	Jenis BMN	NUP	Nilai Perolehan (Rp)
8.01.01.01.001	Software Komputer	2	10.000.000,00
8.01.01.01.001	Software Komputer	4	42.300.000,00
8.01.01.01.001	Software Komputer	5	41.459.000,00
8.01.01.01.001	Software Komputer	6	42.700.000,00
8.01.01.01.001	Software Komputer	8	44.360.000,00
8.01.01.01.001	Software Komputer	10	44.580.000,00
8.01.01.01.001	Software Komputer	11	26.450.000,00
8.01.01.01.001	Software Komputer	12	27.750.000,00
8.01.01.01.001	Software Komputer	13	29.690.000,00
8.01.01.01.001	Software Komputer	14	44.325.000,00
Total			353.614.000,00

Aset-aset tersebut dihentikan penggunaannya dengan pertimbangan bahwa:

1. Aset Tak Berwujud dimaksud telah dilakukan unifikasi, integrasi, dan/atau konsolidasi pengelolaannya pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu (500100);
2. Satuan Kerja tidak lagi memiliki kendali dan/atau manfaat ekonomi maupun potensi jasa atas penggunaan aset tersebut;

3. Penghentian penggunaan ini merupakan bagian dari penyesuaian penarusahaan BMN dan tidak selalu identik dengan penghapusan fisik, namun akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme penghapusan BMN.

Aset Lain-Lain

Rp353.614.000,00

C.15 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2021 adalah Rp353.614.000,00 dan Rp0,00.

Adapun daftar Barang Milik Negara yang masuk ke dalam Aset Lain-Lain adalah:

Kode Barang	Jenis BMN	NUP	Nilai Perolehan (Rp)
8.01.01.01.001	Software Komputer	2	10.000.000,00
8.01.01.01.001	Software Komputer	4	42.300.000,00
8.01.01.01.001	Software Komputer	5	41.459.000,00
8.01.01.01.001	Software Komputer	6	42.700.000,00
8.01.01.01.001	Software Komputer	8	44.360.000,00
8.01.01.01.001	Software Komputer	10	44.580.000,00
8.01.01.01.001	Software Komputer	11	26.450.000,00
8.01.01.01.001	Software Komputer	12	27.750.000,00
8.01.01.01.001	Software Komputer	13	29.690.000,00
8.01.01.01.001	Software Komputer	14	44.325.000,00
Total			353.614.000,00

Akumulasi

Penyusutan dan

Aset Lainnya

Rp353.614.000,00

C.16 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp353.614.000,00 dan Rp438.664.000,00. Rincian akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya terdiri atas:

Keterangan	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
A. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(0,00)	(0,00)
Jumlah	(0,00)	(0,00)
B. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya		
Akumulasi Amortisasi Software	(353.614.000,00)	(438.664.000,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	(0,00)	(0,00)
Jumlah	(353.614.000,00)	(438.664.000,00)
Total Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(438.664.000,00)	(423.984.000,00)

*Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp16.849.586,00*

C.15 Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp16.849.586,00 dan Rp1.224.509.863,00. Utang kepada pihak ketiga ini terdiri dari:

Keterangan	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	3.257.244,00	0,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	13.592.342,00	1.224.509.863,00
Total	16.849.586,00	1.224.509.863,00

Belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp16.849.586,00 merupakan pembayaran atas anggaran tahun 2025 yang belum dibayarkan kepada penerima. Rincian belanja yang masih harus dibayar sebesar Rp16.849.586,00 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	Tagihan Air Bulan Desember 2025 Bawaslu Kabupaten Paser	66.760,00	Tagihan keluar di bulan Januari Tahun 2026
2.	Tagihan Air Bulan Desember 2025 Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	155.500,00	Tagihan keluar di bulan Januari Tahun 2026
3.	Tagihan Air Bulan Desember 2025 Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara	440.600,00	Tagihan keluar di bulan Januari Tahun 2026
4.	Tagihan Air Bulan Desember 2025 Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	526.818,00	Tagihan keluar di bulan Januari Tahun 2026
5.	Tagihan Air Bulan Desember 2025 Bawaslu Kabupaten Berau	155.600,00	Tagihan keluar di bulan Januari Tahun 2026
6.	Tagihan Air Bulan Desember 2025 Bawaslu Kota Bontang	373.500,00	Tagihan keluar di bulan Januari Tahun 2026
7.	Tagihan Listrik Bulan Desember 2025 Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	982.361,00	Tagihan keluar di bulan Januari Tahun 2026
8.	Tagihan Listrik Bulan Desember 2025 Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	7.562.812,00	Tagihan keluar di bulan Januari Tahun 2026
9.	Tagihan Listrik Bulan Desember 2025 Bawaslu Kota Bontang	3.328.391,00	Tagihan keluar di bulan Januari Tahun 2026
10.	Kekurangan Gaji Pokok PPPK bulan November s.d. Desember 2025 untuk 7 orang pegawai	1.389.600,00	Kelengkapan dokumen pembayaran baru diterima di bulan Januari Tahun 2026
11.	Kekurangan Tunjangan Suami/Istri PPPK bulan November s.d. Desember 2025	98.640,00	Kelengkapan dokumen pembayaran baru diterima di bulan Januari Tahun 2026
12.	Kekurangan Tunjangan Anak PPPK bulan November s.d. Desember 2025	27.792,00	Kelengkapan dokumen pembayaran baru diterima di bulan Januari Tahun 2026
13.	Kekurangan Gaji Pokok PNS bulan Januari s.d. Desember 2025 untuk 1 pegawai Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	1.420.800,00	Kelengkapan dokumen pembayaran baru diterima di bulan Januari Tahun 2026
14.	Kekurangan Tunjangan Suami/Istri PNS bulan Januari s.d. Desember 2025 untuk 1 pegawai Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	142.080,00	Kelengkapan dokumen pembayaran baru diterima di bulan Januari Tahun 2026
15.	Kekurangan Tunjangan Anak PNS bulan Januari s.d. Desember 2025 untuk 1 pegawai Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	56.832,00	Kelengkapan dokumen pembayaran baru diterima di bulan Januari Tahun 2026
16.	Kekurangan Gaji Pokok PNS bulan Desember 2025 untuk 1 pegawai Bawalsu Provinsi Kalimantan Timur	121.500,00	Kelengkapan dokumen pembayaran baru diterima di bulan Januari Tahun 2026

*Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp0,00*

C.16 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.224.509.863,00.

Yang dimaksud utang jangka pendek lainnya adalah utang pajak bendahara yang belum disetorkan.

*Ekuitas
Rp13.572.880.275,
00*

C.17 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp13.572.880.275,00 dan Rp1106.980.982.048,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset sebesar Rp13.589.717.361,00, dan kewajiban sebesar Rp16.849.586,00. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNPB
Rp449.508,00

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp449.508,00 dan Rp2.275.566,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Jenis Pendapatan	31 Des 2025	31 Des 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
Pendapatan Jasa Giro	449.508,00	2.275.566,00	(80,25)
Jumlah	449.508,00	2.275.566,00	(80,25)

Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Jumlah (Rp)
Setor Jasa Giro Rekening Panwascam se-Kabupaten Penajam Paser Utara	13/02/2025	7EF101JNG83L6N97	205.370,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan Pilkada 2024 se-Kabupaten Kutai Kartanegara	27/03/2025	68A5148VVNU717M0	242.885,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan PSU se-Kabupaten Kutai Kartanegara	04/06/2025	F42F548VVO6DOUAT	1.253,00
Total			449.508,00

Realisasi Pendapatan Jasa Giro per 31 Desember 2025 sebesar Rp449.508,00 merupakan pendapatan jasa giro rekening dana pemilu Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Kalimantan Timur bulan Januari s.d. Desember 2025 dan pendapatan jasa giro rekening dana hibah pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Pegawai

**Rp19.593.050.929,
00**

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp19.593.050.929,00 dan Rp12.162.684.662,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan Beban Pegawai sebesar 61,10% dibanding dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2024. Kenaikan beban pegawai disebabkan oleh:

1. Penambahan jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2025;
2. Adanya penambahan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur; dan
3. Terdapat pegawai yang mengalami mutasi dari unit kerja lain ke Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

Uraian	Realisasi 31 Des 2025 (Rp)	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.789.079.200,00	1.176.472.110,00	52,07
Beban Pembulatan Gaji PNS	31.089,00	17.546,00	77,19
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	64.828.678,00	39.395.680,00	64,56
Beban Tunj. Anak PNS	11.396.452,00	8.472.974,00	34,50
Beban Tunj. Struktural PNS	92.685.000,00	78.890.000,00	17,49
Beban Tunj. Fungsional	24.542.000,00	16.982.000,00	44,52
Beban Tunj. PPh PNS	26.976.658,00	67.718.427,00	(60,16)
Beban Tunj. Beras PNS	70.826.760,00	41.279.400,00	71,58
Beban Uang Makan PNS	323.646.000,00	118.851.000,00	172,31
Beban Tunjangan Umum PNS	87.770.000,00	78.775.000,00	11,42

Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	6.264.817.750,00	6.256.155.050,00	0,14
Beban Gaji Pokok PPPK	3.517.034.100,00	1.183.708.400,00	197,12
Beban Pembulatan Gaji PPPK	52.565,00	15.937,00	229,83
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	208.464.750,00	78.325.840,00	166,15
Beban Tunj. Anak PPPK	61.022.652,00	19.893.920,00	206,74
Beban Tunj. Fungsional PPPK	189.150.000,00	88.200.000,00	114,56
Beban Tunj. Beras PPPK	208.080.765,00	67.278.180,00	209,28
Beban Uang Makan PPPK	638.879.000,00	114.076.000,00	459,64
Beban Tunj. Umum PPPK	147.583.750,00	5.365.000,00	2.650,86
Beban Uang Lembur	43.471.000,00	28.734.000,00	51,29
Beban Uang Lembur PPPK	18.706.000,00	0,00	-
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	2.223.000.197,00	1.478.355.034,00	50,37
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	3.581.006.563,00	1.215.723.164,00	194,56
Jumlah Beban Kotor	19.593.050.929,00	12.162.684.662,00	61,09
Pengembalian Beban Pegawai	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Jumlah Beban Pegawai	19.593.050.929,00	12.162.684.662,00	61,09

Terdapat perbedaan jumlah realisasi belanja pegawai dibandingkan jumlah beban pegawai per 31 Desember 2025. Hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut:

Mutasi Tambah	
Belanja Pegawai (LRA)	19.589.793.685,00
Jurnal Kekurangan Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK	3.257.244,00
Jumlah Mutasi Tambah	19.593.050.929,00
Jumlah Mutasi Kurang	(0,00)
Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2025	19.593.050.929,00

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp18.318.075,00

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp18.318.075,00 dan Rp1.296.230.650,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan mengalami penurunan hingga 98,59% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 terdapat penurunan pemakaian barang persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Uraian	Realisasi 31 Des 2025 (Rp)	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	18.318.075,00	1.296.230.650,00	(98,59)
Jumlah	18.318.075,00	1.296.230.650,00	(98,59)

Terdapat perbedaan jumlah realisasi belanja barang persediaan dibandingkan jumlah beban persediaan per 31 Desember 2025. Hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut:

Saldo Awal	
Barang Konsumsi	7.131.000,00
Persediaan Lainnya	0,00
Mutasi Tambah:	
Belanja Barang Persediaan – Barang Konsumsi	21.271.200,00
Perolehan Lainnya	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	28.402.200,00
Mutasi Kurang	
Sisa Persediaan Per 31 Desember 2025	
1. Barang Konsumsi	(0,00)
2. Persediaan Lainnya	(10.084.125,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(10.084.125,00)
Jumlah Beban Persediaan per 31 Des 2025	18.318.075,00

*Beban Barang dan
Jasa
Rp22.767.631.134,
00*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp22.767.631.134,00 dan Rp118.369.632.232,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 terjadi Beban Barang dan Jasa mengalami penurunan sebesar 80,77% dibanding dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2024. Penurunan terjadi dikarenakan pada tahun 2024 diselenggarakan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sehingga realisasi belanja sampai ke tingkat PTPS, sedangkan pada tahun 2025 tahapan Pemilu dan Pilkada telah selesai sehingga aktivitas belanja mengalami penurunan yang signifikan.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Uraian Jenis Beban	Realisasi 31 Des 2025 (Rp)	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	4.156.986.810,00	7.906.905.010,00	(47,43)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	318.553.500,00	468.504.550,00	(32,01)
Beban Barang Operasional Lainnya	267.438.600,00	706.744.274,00	(62,16)
Beban Bahan	2.627.393.612,00	21.975.401.781,00	(88,04)
Beban Honor Output Kegiatan	6.996.530.000,00	51.747.598.000,00	(86,48)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	336.596.927,00	3.086.663.349,00	(89,10)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	43.600.000,00	27.000.000,00	61,48

Beban Langganan Listrik	365.756.537,00	836.540.805,00	(56,28)
Beban Langganan Air	52.449.610,00	244.027.938,00	(78,51)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0,00	1.552.500,00	(100)
Beban Sewa	7.695.386.469,00	26.255.467.270,00	(70,69)
Beban Jasa Profesi	228.700.000,00	1.866.846.463,00	(87,75)
Beban Jasa Lainnya	170.000.000,00	3.369.642.000,00	(94,95)
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0,00	1.300.000,00	(100)
Jumlah Beban Kotor	23.259.392.065,00	118.494.193.940,00	(80,37)
Pengembalian Beban	(491.760.931,00)	(124.561.708,00)	294,79
Jumlah Beban Barang dan Jasa	22.767.631.134,00	118.369.632.232,00	(80,77)

Terdapat perbedaan jumlah realisasi belanja barang dan jasa dibandingkan jumlah beban barang dan jasa per 31 Desember 2025. Hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa	22.274.934.109
Mutasi Tambah	
Belanja yang Masih Harus Dibayar	
Belanja Langganan Listrik	11.873.564,00
Belanja Langganan Air	1.718.778,00
Beban Sewa dari Sewa Tahun yang Lalu	980.661.473,00
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	43.600.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	23.312.7787.924,00
Mutasi Kurang	
Jurnal Balik atas Beban Tahun yang Lalu	(350.156.790,00)
Belanja Barang Dibayar di muka	(195.000.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(545.156.790,00)
Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Des 2025	22.767.631.134,00

Beban**Pemeliharaan****Rp701.178.975,00****D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp701.178.975,00 dan Rp1.906.456.273,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Per 31 Desember 2025 terdapat penurunan Beban Pemeliharaan sebesar 63,11% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2024. Penurunan terdapat pada beban pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar 78,69% yang dikarenakan pengurangan anggaran pemeliharaan diikuti dengan penurunan belanja pemeliharaan mengikuti harga wajar pasar. Rincian beban pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	Realisasi 31 Des 2025 (Rp)	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.139.000,00	117.949.500,00	(78,69)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	678.214.975,00	1.788.506.773,00	(62,08)
Jumlah Beban Kotor	703.353.975,00	1.906.456.273,00	(63,11)
Pengembalian Beban Pemeliharaan	(2.175.000,00)	(0,00)	-
Jumlah Beban Pemeliharaan	701.178.975,00	1.906.456.273,00	(63,11)

Tidak terdapat perbedaan jumlah realisasi Belanja Pemeliharaan pada Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan jumlah Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional per 31 Desember 2025.

D.6 Beban Perjalanan Dinas**Beban Perjalanan****Dinas****Rp22.767.631.134,00**

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp22.767.631.134,00 dan Rp118.369.632.232,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan

jabatan. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2024, Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 81,38%, penurunan paling signifikan terjadi pada Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota yaitu sebesar 92,95%. Penurunan pada beban perjalanan dinas tahun anggaran 2025 disebabkan karena tahapan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah telah selesai sehingga aktivitas belanja mengalami penurunan yang signifikan. Selain itu, terdapat efisiensi atas anggaran belanja Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2025.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Uraian Jenis Beban	Realisasi 31 Des 2025 (Rp)	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	17.314.537.629,00	39.301.891.668,00	(55,94)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.048.827.860,00	52.452.653.179,00	(90,37)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.181.297.742,00	45.116.590.400,00	(92,95)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	926.588.424,00	5.939.918.034,00	(84,37)
Jumlah Beban Kotor	26.471.251.655,00	142.811.053.281,00	(81,46)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas	(71.554.400,00)	(992.255.615,00)	(92,79)
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	26.399.697.255,00	141.818.797.666,00	(81,38)

Terdapat perbedaan jumlah realisasi belanja perjalanan dinas dibandingkan jumlah beban perjalanan dinas per 31 Desember 2025, hasil mutasi beban yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah:		
Belanja Perjalanan Dinas	Rp	27.239.328.396,00
Belanja yang Masih Harus Dibayar	Rp	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	27.239.328.396,00
Mutasi Kurang:		
Jurnal Balik atas Beban Tahun yang Lalu	Rp	(839.631.141,00)
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	(839.631.141,00)

Jumlah Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025	Rp	26.399.697.255,00
--	----	-------------------

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp1.390.281.244,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.390.281.244,00 dan Rp1.314.640.792,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	Realisasi 31 Des 2025 (Rp)	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.356.681.954,00	1.270.744.489,00	6,76
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	33.036.790,0	18.196.666,00	81,55
Beban Penyusutan Jaringan	562.500,00	562.500,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional	0,00	10.457.137,00	(100)
Jumlah Penyusutan	1.390.281.244,00	1.299.960.792,00	6,95
Beban Amortisasi Software	0,00	14.680.000,00	(100)
Jumlah Amortisasi	0,00	14.680.000,00	(100)
Jumlah Penyusutan dan Amortisasi	1.390.281.244,00	1.314.640.792,00	5,75

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
(Rp12.500,00)*

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp12.500,00) dan Rp0,00. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Beban penyisihan piutang tak tertagih sebesar (Rp12.500,00) merupakan selisih dari beban penyisihan piutang tak tertagih per Desember 2024 sebesar (Rp2.034.348,00) atas nilai piutang sebesar Rp406.869.509,00 dengan beban penyisihan piutang tak tertagih per Desember 2025 sebesar (Rp2.021.848,00) atas nilai piutang Rp404.369.509,00.

*Surplus (Defisit)
Pelepasan Aset
Rp165.420.100,00*

D.9 Surplus (Defisit) Pelepasan Aset

Pos Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan pelepasan aset dan beban pelepasan aset selama satu periode pelaporan. Defisit dari pelepasan aset adalah selisih kurang antara pendapatan pelepasan aset dan beban pelepasan aset selama satu periode pelaporan. Surplus dari Kegiatan Operasional pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp165.420.100,00 dan (Rp3.850.493,00). Rincian Kegiatan Operasional adalah sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 31 Des 2025 (Rp)	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Pendapatan Pelepasan Aset	364.454.000,00	5.000.000,00	7.189,08
Beban Pelepasan Aset	199.033.900,00	8.850.493,00	2.148,85
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	165.420.100,00	(3.850.493,00)	(4.396,08)

Surplus dari Pelepasan Aset merupakan pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp165.420.100,00, yang terdiri dari:

- a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp364.454.000,00 merupakan pendapatan dari hasil lelang atas Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari:
- 1) Pendapatan atas hasil lelang kendaraan roda 4 Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp361.884.000 sesuai dengan Risalah Lelang Nomor: 89/13.02/2025-01; dan
 - 2) Pendapatan atas hasil lelang berupa 1 (satu) paket bongkaran material gedung Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara senilai Rp2.570.000,00 sesuai dengan Risalah Lelang Nomor: 124/13.02/2025-01.
- b. Beban Pelepasan Aset sebesar Rp199.033.900,00 merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat yang masih memiliki sisa masa manfaat. Atas sisa manfaat tersebut, diakui sebagai beban pelepasan aset.

*Surplus (Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp594.542.998,00*

D. 10 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp594.542.998,00 dan Rp1.552.759.633,00. Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Des 2025 (Rp)	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	594.542.998,00	1.552.759.633,00	(61,65)
Jumlah Pendapatan	594.542.998,00	1.552.759.633,00	(61,65)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	594.542.998,00	1.552.759.633,00	(61,65)

Surplus dari Kegiatan Non Operasional merupakan pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp594.542.998,00 yang terdiri dari:

- a. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp399.536.398,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Jumlah (Rp)
Pengembalian atas Uang Harian Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Black Campaign, Politik Uang, dan Politisasi SARA Pilkada serentak 2024 di Prov. Kaltim tgl 21 November 2024 an. M. Jordiansyah.dkk	01/10/2025	3B6540NA0E6L7E3C	900.000,00
Pengembalian Belanja Perlengkapan Peserta Apel Siaga Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara an. CV Karya Kutai Sekawan	10/10/2025	5562D6U8F89ORQB9	1.253.435,00
Pengembalian Biaya Pemeliharaan peralatan dan mesin kendaraan dinas operasional roda 4 Gakkumdu (BBM) Kota Balikpapan tahun 2024	11/10/2025	5159C6U8F89OSLFO	6.224.945,00
Pengembalian Perjalanan dinas Bawaslu Kota Balikpapan Tahun 2024 an. Wasanti S.H., M.H, dkk	11/10/2025	7B8A27QLV2S59K52	18.615.300,00
Pengembalian Belanja Jasa lainnya Media Sosialisasi Cetak Baliho Sosialisasi Outdoor Bawaslu kota Balikpapan thn 2024 an. PT Lima Raya Sinergi	12/10/2025	74C757QLV2S6AF0K	1.367.230,00
Pengembalian Belanja Jasa Lainnya Sarpras Pendukung Sosialisasi Bawaslu kota Balikpapan thn 2024 an. PT Lima Raya Sinergi	12/10/2025	550DA48VVOIKMF2I	1.135.289,00
Pengembalian Belanja Sewa gedung dan Perlengkapan Rapat koordinasi antar Bawaslu Kota Balikpapan, panwas kecamatan dan pengawas TPS se kota Balikpapan thn 2024 an. PT Lima Raya Sinergi	12/10/2025	D242448VVOIKMG4E	3.686.724,00

Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Jumlah (Rp)
Pengembalian Perjalanan Dinas Bawaslu Kukar TA 2024 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kukar	13/10/2025	58C042G503DSTL9U	21.605.200,00
Pengembalian belanja seminar kit Sosialisasi Pengawasan Menciptakan Pilkada Sehat tanpa Politik Uang, isu sara, hoax, dan ujaran kebencian tahun 2024 an. CV Nusa Etam Nusantara	13/10/2025	CB32855DFJ532J3F	7.871.171,00
Pengembalian Perjalanan Dinas Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 an. Abd. Khohar, dkk	13/10/2025	AD2C70NA0E945DSS	37.017.800,00
Pengembalian Belanja jasa Event Organizer Pengawasan Pilkada Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara an. CV. Topmost Management	25/10/2025	FAD1E3CIFU0EV5BQ	2.130.690,00
Pengembalian Belanja Bahan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara an. CV. Topmost Management	25/10/2025	161347QLV2SD056U	1.500.000,00
Pengembalian Belanja Pengadaan Sewa Meubelair Panwas Kecamatan se-Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024 - Tahap 1	27/10/2025	7036961QVDNOLEAH	200.000.000,00
Pengembalian Belanja Barang TAYL Pengembalian Belanja Seminar Kit Kegiatan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 an. CV Pandawa Tujuh Abadi	29/10/2025	574042G503ECIHM9	6.500.000,00
Pengembalian Belanja Pengadaan Jasa Paket Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 an. She's Cha Production	31/10/2025	5583E3CIFU0Q2CFT	2.000.000,00
Pengembalian belanja bahan peserta sosialisasi pengawasan pemilu Bawaslu Kota Balikpapan tahun 2024 a.n. CV. Kaizen Shin	01/11/2025	737BF0NA0E9KTIP5	3.000.000,00

Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Jumlah (Rp)
Pengembalian belanja bahan perlengkapan rakor dengan stakeholder (apel siaga) Bawaslu Kota Balikpapan a.n. Kaizen Shin	01/11/2025	64BBD55DFJ5IUJN7	1.000.000,00
Pengembalian seminar kit pada kegiatan sosialisasi peningkatan pengawasan partisipatif bagi peran mahasiswa dalam pengawasan partisipatif pada Pilkada Serentak tahun 2024	21/11/2025	4087F48VVOLS7PE2	1.934.271,00
Pengembalian seminar kit pada kegiatan peran masyarakat partisipatif pada Pemilihan Serentak tahun 2024	21/11/2025	A6D3F55DFJ88KQ6H	2.109.184,00
Pengembalian seminar kit pada Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024	21/11/2025	F47D53CIFU3FQP6N	3.906.816,00
Pengembalian belanja pengadaan sewa sarana dan prasarana Sentra Gakkumdu a.n. CV Indah Karya Nusantara - Tahap 1	24/11/2025	B6B0E55DFJ88M9NJ	5.000.000,00
Pengembalian belanja alat tulis kantor, fotokopi /penggandaan dan komputer supply Bawaslu Kota Balikpapan tahun 2024 a.n. Toko Era	25/11/2025	72AEF61QVDQP8M8I	10.657.000,00
Pengembalian belanja operasional penambah daya tahan tubuh (vitamin) Bawaslu Kota Balikpapan tahun 2024 a.n. Apotek Madina Farma	25/11/2025	26AD561QVDQP8LOM	10.611.486,00
Pengembalian belanja pengadaan jasa paket kegiatan sosialisasi pengawasan pemilihan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 a.n. She's Cha Production - Tahap 2	28/11/2025	82A9D8N3ETHUNUSL	2.000.000,00
Pengadaan sewa Sarana dan Prasarana Kantor Gakkumdu 160.0/PL Bawaslu Kota Balikpapan tahun 2024	02/12/2025	873CB6U8F8D6UDHP	14.700.000,00
Pengembalian kelebihan pembayaran Honorarium Pokja Pemilihan Kepala Daerah Bawaslu Kota Balikpapan Tahun 2024 An. Kiki Dian Vrawati Simanullang, S.H	09/12/2025	7B5956U8F8FLTUEB	3.420.000,00
Pengadaan paket pekerjaan operasional sewa sarana dan prasarana kantor	19/12/2025	48CCD61QVDTIHT5Q	24.698.057,00

Diketahui dan disetujui secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSN).

Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Jumlah (Rp)
Gakkumdu Bawaslu dan ruang sidang Bawaslu Kota Balikpapan tahun 2024			
Pengembalian belanja pengadaan jasa paket kegiatan sosialisasi pengawasan pemilihan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 a.n. She's Cha Production - Tahap 3	30/12/2025	21D7155DFJBHUV9P	2.000.000,00
Pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain	08/01/2025	04C1D48VVNNMNKEQ	606.800,00
Total			398.929.598,00

- b. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp10.006.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Jumlah (Rp)
Pengembalian Kelebihan Uang Makan PNS bulan Desember 2024	04/02/2025	ABAD96U8F7HMKIKM	6.634.050,00
Pengembalian Kelebihan Belanja Uang Makan PPPK bulan Desember 2024	04/02/2025	1C2E455DFICTQJDV	3.372.550,00
Total			10.006.600,00

c. Pendapatan Perolehan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp185.000.000 merupakan barang yang diperoleh oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sebagai reward dari bank atas penempatan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah pada rekening bank tersebut. Rincian Perolehan Lainnya sebesar Rp185.000.000,00 adalah sebagai berikut:

Kode Barang	Nama Barang	Kuan1titas	Nilai Perolehan (Rp)
3050104003	Rak Besi	1	1.000.000,00
3050201005	Sice	1	8.000.000,00
3050203001	Mesin penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	3.500.000,00
3050205015	Rak Piring Alumunium	1	2.500.000,00
3100102009	Tablet PC	3	15.000.000,00
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	8.500.000,00
3190102001	Alat Tennis Meja	1	8.000.000,00
3190103010	Treadmill	2	70.000.000,00
3190106003	Sepeda Olah Raga	2	35.500.000,00
3190106006	Samsak Tinju	1	4.500.000,00
3190106999	Peralatan Olah Raga Lainnya	2	28.500.000,00
Total		18	185.000.000,00

Pos Luar Biasa
Rp0,00

D.11 Pos Luar Biasa

Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Defisit LO**(Rp70.109.732.506,00)****D.12 SURPLUS (DEFISIT) LO**

Defisit LO per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp70.109.732.506,00) dan (Rp275.354.343.532,00).

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**Ekuitas Awal****Rp106.980.982.048,00****E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 masing-masing sebesar Rp106.980.982.048,00 dan Rp128.508.324.322,00.

Defisit LO**Rp70.109.732.506,00****E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp70.109.732.506,00) dan (Rp275.354.343.532,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi yang**Menambah/Mengurangi****Ekuitas****(Rp75.839.727.445,00)****E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas**

Koreksi yang Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp75.839.727.445,00) dan Rp13.350.000,00.

Koreksi Nilai Aset Non**Revaluasi****(Rp1.774.800,00)****E.3.1 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi**

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp1.774.800,00) dan Rp13.350.000,00. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi sebesar (Rp1.774.800,00) merupakan tindak lanjut temuan BPK terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara

(BMN) berupa koreksi pencatatan nilai berkurang pada modul aset tetap aset Barang Milik Negara (BMN) berupa Head Set (Peralatan Command Center) berupa Head Set sebanyak 2 buah sebesar Rp1.972.000,00, kemudian terdapat pengembanan nilai buku atas aset tersebut sebesar Rp197.200,00 sehingga nilai buku berkurang atas koreksi aset tersebut sebesar Rp1.774.800,00.

Koreksi Lain-Lain

(Rp75.837.952.645,00)

E.3.2 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp75.837.952.645,00) dan Rp0,00.

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pengembalian Hibah Pemilihan Gubernur Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	(56.203.094.185,00)
2.	Pengembalian Hibah Pemilihan Bupati Bawaslu Kabupaten Berau	(89.172.145,00)
3.	Pengembalian Hibah Pemilihan Bupati Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	(2.627.295.961,00)
4.	Pengembalian Hibah Pemilihan Bupati Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	(4.928.234.891,00)
5.	Pengembalian Hibah Pemilihan Bupati Bawaslu Kabupaten Paser	(4.196.999.734,00)
6.	Pengembalian Hibah Pemilihan Bupati Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara	(1.990.711.598,00)
7.	Pengembalian Hibah Pemilihan Wali Kota Bawaslu Kota Bontang	(2.356.178.082,00)
8.	Pengembalian Hibah Pemilihan Wali Kota Bawaslu Kota Balikpapan	(3.443.766.049,00)
9.	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Panwas Pilkada Kota Samarinda Tahun 2015 yang Disetor pada Tanggal 11 Juni 2025	(2.500.000,00)
Total		(75.837.952.645,00)

Transaksi Antar Entitas
Rp52.541.358.178,00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp52.541.358.178,00 dan Rp253.813.651.258,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN.

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai (Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	31.948.868.748,00
Diterima dari Entitas Lain	(774.446.506,00)
Transfer Keluar	(822.405.020,00)
Pengesahan Hibah Langsung	24.666.974.859,00
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(2.477.633.903,00)
Total	52.541.358.178,00

Ditagihkan ke Entitas Lain
Rp31.948.868.748,00

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp31.948.868.748,00 merupakan belanja yang berasal dari anggaran rupiah murni dikurangi dengan pengembalian belanja tahun anggaran 2025, terdiri dari:

Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain per 31 Desember 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Belanja Pegawai	19.589.793.685,00
Belanja Barang	12.909.576.144,00
Belanja Modal	14.989.250,00
Pengembalian Belanja	(565.490.331,00)
Total	31.948.868.748,00

Diterima ke Entitas Lain
Rp774.446.506,00

E.4.2. Diterima ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja yang melibatkan kas negara (BUN). Pada

periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar (Rp774.446.506,00) dengan rincian sebagai berikut:

Diterima dari Entitas Lain

Uraian	2025	
	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	361.884.000,00
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0,00	449.508,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	10.006.600,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	399.536.398,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	0,00	2.570.000,00
Total	0,00	774.446.506,00

Penjelasan atas rincian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp361.884.000,00 merupakan pendapatan dari hasil lelang kendaraan roda 4 Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Jumlah (Rp)
Setor Pendapatan Bukan Pajak Hasil Lelang Kendaraan Roda 4	17/06/2025	2855155DFIP8M3OI	361.884.000,00
Total			361.884.000,00

- b. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp449.508,00 merupakan pendapatan jasa giro Rekening Dana Pemilu dan Rekening Dana Hibah Bawaslu Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Jumlah (Rp)
Setor Jasa Giro Rekening Panwascam se-Kabupaten Penajam Paser Utara	13/02/2025	7EF101JNG83L6N97	205.370,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan Pilkada 2024 se-Kabupaten Kutai Kartanegara	27/03/2025	68A5148VVNU717M0	242.885,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan PSU se-Kabupaten Kutai Kartanegara	04/06/2025	F42F548VVO6DOUAT	1.253,00
Total			449.508,00

- c. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Rp10.006.600,00 terdiri dari setor kelebihan pembayaran atas belanja pegawai tahun anggaran 2024 yang terdiri dari:

Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Jumlah (Rp)
Pengembalian Kelebihan Uang Makan PNS bulan Desember 2024	04/02/2025	ABAD96U8F7HMKIKM	6.634.050,00
Pengembalian Kelebihan Belanja Uang Makan PPPK bulan Desember 2024	04/02/2025	1C2E455DFICTQJDV	3.372.550,00
Total			10.006.600,00

- d. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu Rp399.536.398,00 terdiri dari setor kelebihan pembayaran belanja barang tahun anggaran 2024 yang terdiri dari:

Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Jumlah (Rp)
Pengembalian Id Card Bawaslu Provinsi Kaltim	24/02/2025	7253F55DFIDHQCQ4	2.085.000,00
Pengembalian Bawaslu Kota Balikpapan atas Temuan BPK Tahun 2016 a.n. Jumiko	08/012025	04C1D48VVNNMNKE Q	606.800,00
Pengembalian atas Uang Harian Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Black Campaign, Politik	01/10/2025	3B6540NA0E6L7E3C	900.000,00

Uang,dan Politisasi SARA Pilkada serentak 2024 di Prov.Kaltim tgl 21 November 2024 an. M. Jordiansyah.dkk			
Pengembalian Belanja Perlengkapan Peserta Apel Siaga Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara an. CV Karya Kutai Sekawan	10/10/2025	5562D6U8F89ORQB9	1.253.435,00
Pengembalian Biaya Pemeliharaan peralatan dan mesin kendaraan dinas operasional roda 4 Gakkumdu (BBM) Kota Balikpapan tahun 2024	11/10/2025	5159C6U8F89OSLFO	6.224.945,00
Pengembalian Perjalanan dinas Bawaslu Kota Balikpapan Tahun 2024 an. Wasanti S.H.,M.H, dkk	11/10/2025	7B8A27QLV2S59K52	18.615.300,00
Pengembalian Belanja Jasa lainnya Media Sosialisasi Cetak Baliho Sosialisasi Outdoor Bawaslu kota Balikpapan thn 2024 an. PT Lima Raya Sinergi	12/10/2025	74C757QLV2S6AF0K	1.367.230,00
Pengembalian Belanja Jasa Lainnya Sarpras Pendukung Sosialisasi Bawaslu kota Balikpapan thn 2024 an.PT Lima Raya Sinergi	12/10/2025	550DA48VVOIKMF2I	1.135.289,00
Pengembalian Belanja Sewa gedung dan Perlengkapan Rapat koordinasi antar Bawaslu Kota Balikpapan,panwas kecamatan dan pengawas TPS se kota Balikpapan	12/10/2025	D242448VVOIKMG4E	3.686.724,00

thn 2024 an. PT Lima Raya Sinergi			
Pengembalian Perjalanan Dinas Bawaslu Kukar TA 2024 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kukar	13/10/2025	58C042G503DSTL9U	21.605.200,00
Pengembalian belanja seminar kit Sosialisasi Pengawasan Menciptakan Pilkada Sehat tanpa Politik Uang, isu sara,hoax,dan ujaran kebencian tahun 2024 an. CV Nusa Etam Nusantara	13/10/2025	CB32855DFJ532J3F	7.871.171,00
Pengembalian Perjalanan Dinas Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 an. Abd. Khohar, dkk	13/10/2025	AD2C70NA0E945DSS	37.017.800,00
Pengembalian Belanja jasa Event Organizer Pengawasan Pilkada Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara an. CV. Topmost Management	25/10/2025	FAD1E3CIFU0EV5BQ	2.130.690,00
Pengembalian Belanja Bahan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara an. CV. Topmost Management	25/10/2025	161347QLV2SD056U	1.500.000,00
Pengembalian Belanja Pengadaan Sewa Meubelair Panwas Kecamatan se-Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024 - Tahap 1	27/10/2025	7036961QVDNOLEAH	200.000.000,00

Pengembalian Belanja Barang TAYL Pengembalian Belanja Seminar Kit Kegiatan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 an. CV Pandawa Tujuh Abadi	29/10/2025	574042G503ECIHM9	6.500.000,00
Pengembalian Belanja Pengadaan Jasa Paket Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 an. She's Cha Production	31/10/2025	5583E3CIFU0Q2CFT	2.000.000,00
Pengembalian belanja bahan peserta sosialisasi pengawasan pemilu Bawaslu Kota Balikpapan tahun 2024 a.n. CV. Kaizen Shin	01/11/2025	737BF0NA0E9KTIP5	3.000.000,00
Pengembalian belanja bahan perlengkapan rakor dengan stakeholder (apel siaga) Bawaslu Kota Balikpapan a.n. Kaizen Shin	01/11/2025	64BBD55DFJ5IUJN7	1.000.000,00
Pengembalian seminar kit pada kegiatan sosialisasi peningkatan pengawasan partisipatif bagi peran mahasiswa dalam pengawasan partisipatif pada Pilkada Serentak tahun 2024	21/11/2025	4087F48VVOLS7PE2	1.934.271,00
Pengembalian seminar kit pada kegiatan peran masyarakat partisipatif pada Pemilihan Serentak tahun 2024	21/11/2025	A6D3F55DFJ88KQ6H	2.109.184,00

Pengembalian seminar kit pada Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024	21/11/2025	F47D53CIFU3FQP6N	3.906.816,00
Pengembalian belanja pengadaan sewa sarana dan prasarana Sentra Gakkumdu a.n. CV Indah Karya Nusantara - Tahap 1	24/11/2025	B6B0E55DFJ88M9NJ	5.000.000,00
Pengembalian belanja alat tulis kantor, fotokopi/penggandaan dan komputer supply Bawaslu Kota Balikpapan tahun 2024 a.n. Toko Era	25/11/2025	72AEF61QVDQP8M8I	10.657.000,00
Pengembalian belanja operasional penambah daya tahan tubuh (vitamin) Bawaslu Kota Balikpapan tahun 2024 a.n. Apotek Madina Farma	25/11/2025	26AD561QVDQP8LO M	10.611.486,00
Pengembalian belanja pengadaan jasa paket kegiatan sosialisasi pengawasan pemilihan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 a.n. She's Cha Production - Tahap 2	28/11/2025	82A9D8N3ETHUNUSL	2.000.000,00
Pengadaan sewa Sarana dan Prasarana Kantor Gakkumdu 160.0/PL Bawaslu Kota Balikpapan tahun 2024	02/12/2025	873CB6U8F8D6UDHP	14.700.000,00
Pengembalian kelebihan pembayaran Honorarium Pokja Pemilihan Kepala Daerah Bawaslu Kota Balikpapan Tahun 2024 An. Kiki	09/12/2025	7B5956U8F8FLTUEB	3.420.000,00

Dian Verawati Simanullang, S.H			
Pengadaan paket pekerjaan operasional sewa sarana dan prasarana kantor Gakkumdu Bawaslu dan ruang sidang Bawaslu Kota Balikpapan tahun 2024	19/12/2025	48CCD61QVDTIHT5Q	24.698.057,00
Pengembalian belanja pengadaan jasa paket kegiatan sosialisasi pengawasan pemilihan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 a.n. She's Cha Production - Tahap 3	30/12/2025	21D7155DFJBHUV9P	2.000.000,00
Total			399.446.398,00

Transfer Keluar
Rp822.405.020,00

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar sebesar (Rp822.405.020,00) merupakan transfer Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur ke Bawaslu Kota Balikpapan dan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan rincian sebagai berikut:

- Transfer Peralatan dan Mesin dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur ke Bawaslu Kota Balikpapan sebesar Rp758.735.536,00 dengan dasar dokumen berupa Berita Acara Transfer Barang Milik Negara Nomor: 446/PL.09/KI/10/2025; dan
- Transfer Peralatan dan Mesin serta Tanah dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur ke Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp1.516.162.065,00 dengan dasar dokumen berupa Berita Acara Transfer Barang Milik Negara Nomor: 453/PL.09/KI/10/2025.

*Pengesahan Hibah
Langsung
Rp24.666.974.859,00*

E.4.4 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung sebesar Rp24.666.974.859,00 adalah pengesahan atas penerimaan hibah di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, dengan rincian sebagai berikut:

Pengesahan Hibah Langsung	Jumlah (Rp)
Hibah Barang Bawaslu Kota Bontang	268.490.000,00
Hibah Uang Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	10.863.243.000,00
Hibah Uang Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	5.333.499.242,00
Hibah Tanah Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	6.374.597.000,00
Hibah Tanah Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara	506.374.617,00
Hibah Gedung dan Bangunan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	1.320.771.000,00
Total (Rp)	24.666.974.859,00

*Pengesahan
Pengembalian Hibah
Langsung
(Rp2.477.633.903,00)*

E.4.5 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sebesar (Rp2.477.633.903,00) merupakan pengesahan atas pengembalian pendapatan hibah langsung untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Pengesahan Hibah Langsung	Jumlah (Rp)
Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	(2.254.461.950,00)
Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	(223.171.953,00)
Total (Rp)	(2.477.633.903,00)

Penurunan

Ekuitas

(Rp93.408.101.773,00)

E.5 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/penurunan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp93.408.101.773,00) dan (Rp21.527.342.274,00).

Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Uraian	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
Ekuitas Awal	106.980.982.048,00	128.508.324.322,00
Surplus/Defisit LO	(70.109.732.506,00)	(275.354.343.532,00)
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	(75.839.727.445,00)	13.350.000,00
Penyesuaian Nilai Aset	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(1.774.800,00)	0,00
Koreksi Lain-Lain	(75.837.952.645,00)	0,00
Transaksi Antar Entitas	52.541.358,178,00	253.813.651.258,00
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	(93.408.101.773,00)	(21.527.342.274,00)

Ekuitas Akhir

Rp13.572.880.275,00

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp13.572.880.275,00 dan Rp106.980.982.048,00. Nilai ekuitas akhir merupakan akumulasi nilai ekuitas awal sebesar Rp106.980.982.048,00 dikurangi penurunan ekuitas sebesar (Rp93.408.101.773,00).

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bawaslu. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur termasuk dalam Provinsi Kelas B yang terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur termasuk dalam Provinsi Kelompok Kelas B yang terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat; dan
- c. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum.

F.2 Pejabat Perbendaharaan

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2282.1/KU.01.00/K1/05/2025 tentang Perubahan Kedua Puluh Satu Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi tanggal 02 Mei 2025 telah ditunjuk Pejabat Pengelola Satuan Kerja dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Nasori, S.H., M.H.

Sampai dengan bulan Desember 2025, telah terdapat beberapa pergantian pejabat perbendaharaan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jabatan	Semula	Menjadi	Nomor SK	Tanggal SK
1.	Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Yusuf, S.Si. , M.A.	Nasori, S.H., M.H.	2282.1/KU.01.00/K1/05/2025	02 Mei 2025
2.	Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	Markus Rambu, S.Pd.	Athanasius Andri Purwanta, S.Sos.	477/KP.04/KI/05/2025	14 Mei 2025

F3 Rekening yang Dikelola

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengelola rekening yang berasal dari 2 (dua) sumber anggaran, yaitu Rupiah Murni (RM) dan Hibah Dalam Negeri (HDN).

Rekening yang masih aktif dikelola per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening
RM Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Mandiri	BPG 046 BAWASLU PROV KALTIM	810012684171000
RM Bawaslu Kabupaten Berau	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KAB BERAU	810012684171002
RM Bawaslu Kabupaten Bontang	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KT BONTANG	8100126864171003
RM Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KB KUBAR	8100126864171004
RM Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KB KUTIM	8100126864171006
RM Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	Mandiri	BP 046 BAWASLU KB MAHULU	8100126864171007
RM Bawaslu Kabupaten Paser	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KB PASER	8100126864171008
RM Bawaslu Kota Penajam Paser Utara	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KB PPU	8100126864171009
Rekening Hibah Pemilihan Bupati Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	BRI	RPL046 PDHL PIBUP MHU 282ATB3A	654256864172407
Rekening Hibah Pemilihan Bupati Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	BRI	RPL046 PDH PIBUP MHU 282ATB3A	654266864172517

F4 Pengungkapan Laporan Kinerja dan Program Prioritas Nasional (PN)

1. Laporan Kinerja Satuan Kerja

Kode	Kegiatan	Belanja							
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CQ.5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	41.066.816.000,00	38.465.520.900,00	93,70					
CQ.5245.BAH.001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1.100.000,00	100.000,00	9,09	16	16	Layanan	100,00	
CQ.5245.BIC.001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	519.371.000,00	518.574.160,00	99,85	23	23	Laporan	100,00	
CQ.5245.BIC.002	Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	10.844.109.000,00	9.490.987.139	87,52	1	1	Lembaga	100,00	
CQ.5245.BIC.003	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 01	1.400.216.000,00	1.290.166.246,00	92,14	1	1	Lembaga	100,00	
CQ.5245.BIC.004	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 02	2.014.098.000,00	2.012.858.424,00	99,94	1	1	Lembaga	100,00	
CQ.5245.BIC.005	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 03	1.779.113.000,00	1.646.960.028,00	92,57	1	1	Lembaga	100,00	
CQ.5245.BIC.006	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 04	1.574.418.000,00	1.477.146.946,00	93,82	1	1	Laporan	100,00	
CQ.5245.BIC.007	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 05	10.562.188.000,00	10.395.897.514,00	98,43	1	1	Laporan	100,00	

Kode	Kegiatan	Belanja							
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CQ.5245.BIC.008	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 06	2.308.720.000,00	2.076.098.109,00	89,92	1	1	Laporan	100,00	
CQ.5245.BIC.009	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 07	6.861.863.000,00	6.638.691.487,00	96,75	1	1	Laporan	100,00	
CQ.5245.BIC.010	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 08	1.806.248.000,00	1.649.791.176,00	91,34	1	1	Laporan	100,00	
CQ.5245.BIC.011	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 09	1.230.162.000,00	1.128.690.271,00	91,75	1	1	Laporan	100,00	
WA.4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	550.000,00	100.000,00	18,18					
WA.4355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	550.000,00	100.000,00	18,18	8	8	Dokumen	100,00	
WA.4356	Pengelolaan Data dan Informasi	1.100.000,00	200.000,00	18,18					
WA.4356.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu	550.000,00	100.000,00	18,18	8	8	Laporan	100,00	
WA.4356.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	550.000,00	100.000,00	18,18	8	8	Laporan	100,00	
WA.6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	30.386.625.000,00	28.394.767.686,00	93,44					
WA.6849.EBA.956	Layanan BMN	550.000,00	150.000,00	27,27	8	8	Layanan	100,00	
WA.6849.EBA.956	Layanan Perkantoran	30.368.875.000,00	28.379.178.436,00	93,45	2	2	Layanan	100,00	
WA.6849.EBB.951	Layanan Sarana Internal	15.000.000,00	14.989.250,00	99,93	1	1	Unit	100,00	
WA.6849.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	550.000,00	100.000,00	18,18	8	8	Dokumen	100,00	
WA.6849.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	550.000,00	150.000,00	27,27	8	8	Dokumen	100,00	
WA.6849.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	550.000,00	100.000,00	18,18	8	8	Dokumen	100,00	
WA.6849.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	550.000,00	100.000,00	18,18	8	8	Dokumen	100,00	
WA.6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	3.001.197.000,00	2.980.907.029,00	99,32					

Kode	Kegiatan	Belanja							
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WA.6850.EBA.957	Layanan Hukum	1.200.000,00	600.000,00	50,00	17	17	Laporan	100,00	
WA.6850.EBA.962	Layanan Umum	2.998.797.000,00	2.980.007.029	99,37	10	10	Dokumen	100,00	
WA.6850.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	650.000,00	150.000,00	23,08	9	9	Laporan	100,00	
WA.6850.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	550.000,00	150.000,00	27,27	191	191	Orang	100,00	
Total		74.456.288.000,00	69,841,495,615.00	93,80					

2. Pengungkapan Prioritas Nasional (PN)

Prioritas Nasional VII--Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Pelaksanaannya antara lain melalui satu program prioritas, dua kegiatan prioritas yang tersebar di satu satuan kerja dengan pagu mencapai Rp165.210.000,00 dan realisasi sebesar Rp139.559.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Kegiatan	Belanja							
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CQ.7013	Penguaran pendidikan pengawasan Pemilu Partisipatif	46.900.000,00	33.864.000,00						
CQ.7013.QDB.002	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	46.900.000,00	33.864.000,00	72,20	1	1	Lembaga	100,00	
CQ.7014	Pengawasan pendataan DPT berkelanjutan	118.310.000,00	105.695.400,00						
CQ. 7014.QIC.002	Hasil Pengawasan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	118.310.000,00	105.695.400,00	89,34	8	8	Laporan		
Total		165.210.000.000,00	139.559.400,00	84,47					

F. 5 Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK, BPKP, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

a. Terdapat Temuan Pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP atas Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan rincian sebagai berikut:

Unit	LHP	Nilai Temuan
Provinsi	APIP	30,28%
Provinsi	BPKP 2024	100,00%
Provinsi	BPK 2024	75,00%

b. Pengembalian Sisa Dana Hibah Pilkada TA. 2015

Pada tanggal 04—14 September 2023, dilakukan audit kinerja oleh Inspektorat Wilayah III pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Bawaslu Kota Samarinda, dan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada kesempatan itu pula, tim reviu untuk Bawaslu Kota Samarinda melakukan tindak lanjut atas Sisa Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2015 a.n. Meity Landemeyke Torar. Pada tanggal 07 September 2023, telah diperbaharui surat pernyataan yang isinya antara lain:

- 1) Jumlah kerugian/kekurangan tersebut telah saya ganti dengan menyetorkan ke Kas Daerah secara bertahap dengan total senilai Rp41.600.000 pada tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan 03 Januari 2023;
- 2) Jumlah kekurangan atas piutang senilai Rp406.859.509.000 akan diganti dalam jangka waktu 6 bulan (terhitung) dari tanggal 07 September 2023 s.d. 07 Maret 2024 dengan angsuran per bulan minimal Rp2.000.000 yang akan disetorkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima);
- 3) Sebagai jaminan atas pernyataan di atas, Ibu Meity Landemeyke Torar bersedia menyerahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut tanah dengan bukti status kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00527, pemegang hak milik Alexander Agustinus Rottie (Suami Ibu Meity Landemeyke Torar) luas 7.321 m² (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Meter Persegi) yang berlokasi di Desa Batu Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara dan buku bank BRI dan ATM a.n Meity Landemeyke Torar dengan nomor 7385-01-006266-53-4;

- 4) Dalam jangka waktu 6 bulan setelah Ibu Meity Landemeyke Torar menandatangani pernyataan tersebut, beliau akan menjual aset yang dijaminkan tersebut pada poin nomor 3 (tiga) untuk melunasi sisa kerugian yang menjadi tanggungan beliau. Apabila hasil penjualan aset tersebut tidak cukup untuk melunasi sisa kerugian yang menjadi tanggungan beliau, maka beliau akan menjual aset lain yang dimiliki sehingga lunas. Ibu Meity Landemeyke Torar menjamin bahwa ahli waris atau pihak manapun tidak akan melakukan gugatan atau tuntutan hukum atau keberatan terhadap penggunaan uang dan/atau barang untuk menyelesaikan kerugian negara tersebut.

c. Tindak Lanjut Audit Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Tindak lanjut atas notisi hasil audit kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atas Pengelolaan Dana APBN Tahun Anggaran 2023 pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Bawaslu Kota Samarinda, dan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

1) Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

- Terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja, Uang Makan, Tunjangan Struktural, dan Tunjangan Fungsional a.n. Lely Febriyanti dan a.n. Jumiaty. Atas hal tersebut, a.n. Lely Febriyanti telah melakukan pengembalian ke kas negara, sedangkan a.n. Jumiaty telah membuat surat pertanggungjawaban mutlak untuk menyeter kelebihan/duplikasi pembayaran dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mulai bulan Januari s.d September 2023;
- Terdapat kelebihan pembayaran honorarium pengelola keuangan dengan total sebesar Rp21.868.000,00, seluruhnya telah dilakukan pengembalian ke kas negara;
- Terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar Rp45.518,00, seluruhnya telah dilakukan pengembalian ke kas negara;
- Terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar Rp35.150,00, seluruhnya telah dilakukan pengembalian ke kas negara;
- Terdapat kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp3.750.000.00, seluruhnya telah dilakukan pengembalian ke kas negara.

2) Bawaslu Kota Samarinda

- Terkait dengan tindak lanjut temuan pemeriksaan pada Bawaslu Kota Samarinda per 31 Juli 2023 yang berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) Nomor 25c/HP/XIV/05/2017, masih terdapat rekomendasi dengan status “Belum Tuntas” sebanyak 1 (satu) temuan dengan total saldo senilai Rp406.869.509,00, Bawaslu Kota Samarinda telah melakukan pertemuan dengan Sdri. Meity Landemeyke Torar selaku BP Panwas Kota Samarinda Tahun 2015. Dalam pertemuan tersebut, Sdri. Meity Landemeyke Torar membuat SKTJM dan menyerahkan buku tabungan serta Kartu ATM.

- Terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar Rp716.625,00, seluruhnya telah dilakukan pengembalian ke kas negara.

3) Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara

- Terdapat kekurangan kursi sebanyak 5 (lima) unit pada Sewa Meubelair Panwaslu Kecamatan Sebulu, atas hal tersebut telah dilakukan penyetoran kembali ke kas negara sebesar 5 kurs x Rp50.000,00 x 6 bulan dengan total sebesar Rp1.500.000,00;
- Terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar Rp84.375,00, seluruhnya telah dilakukan pengembalian ke kas negara.

d. Hasil Reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (BPKP)

Berdasarkan Hasil Reviu atas Pertanggungjawaban Keuangan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada periode Semester I Tahun 2024 (1 Januari s.d. 30 Juni 2024) pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, terdapat catatan antara lain:

- 1) Terdapat pertanggungjawaban anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan Tahun 2024 yang belum sesuai ketentuan itu pada Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Tahun 2024 terdapat kelebihan pembayaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebesar Rp4.293.000,00;
- 2) Tidak terdapat aturan atau dasar hukum dalam pengenaan tarif honorarium yang sudah dibayarkan bagi staf pengelola keuangan pada Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pembayaran uang harian perjalanan dinas bagi PPNP.

F.6 Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai. Bawaslu telah mengimplementasikan PIPK tersebut dengan telah menentukan akun signifikan yaitu:

1. Kas di Bendahara Pengeluaran;
2. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah;
3. Peralatan dan Mesin; dan
4. Beban Perjalanan Dinas Biasa.

Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan Penilaian Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan melakukan penilaian terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas. Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi. Berdasarkan hasil penilaian tersebut Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tidak ada temuan, baik kelemahan material, kelemahan signifikan maupun kelemahan yang berdampak rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah efektif.